



BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Edisi 70 Volume XVIII / Juni 2022

53

Ditjen Ketenagalistrikan
Peroleh Penghargaan
Pengaduan Layanan Publik



6

Penerapan Tarif Listrik
Adjustment Sama Sekali
Tidak Menyentuh
Masyarakat Tidak Mampu

12

Menteri ESDM Resmikan
PLTGU Riau, Biaya
Produksi Listrik Sumatera
Lebih Murah dan Bersih



4 NOS!

**PEJABAT DAN PEGAWAI DITJEN GATRIK
TIDAK MENERIMA PEMBERIAN APAPUN**



Segala bentuk pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.



NO BRIBERY

(Tidak boleh ada suap menyuap)



NO KICKBACK

(Tidak boleh ada uang komisi)



NO GIFT

(Tidak boleh ada hadiah yang tak wajar)



NO LUXURIOUS HOSPITALITY

(Tidak boleh ada jamuan yang berlebihan)

LAPORKAN!

Korupsi dan Gratifikasi

wbs.esdm.go.id



WHISTLE BLOWING SYSTEM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketidakpuasan pelayanan publik

lapor.go.id



gatrik.esdm.go.id

/



@infogatrik

/



Info Gatrik



BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Edisi 70 Volume XVIII / Juni 2022

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Pimpinan Redaksi

Pandu Satria Jati Bonifasius

Redaktur

Anggita Miftah Hairani
Utami Hikmaasih
Agnes Tania
Dina Andriani

Penyunting/Editor

Ernawaty

Desain Grafis

Agus Surahman
Agah Muhammad Abduh

Sekretariat

Arujin
Fiantina Mayasari
Nur Mazidah

Alamat Redaksi

Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.gatrik.esdm.go.id

DARI REDAKSI

Pembaca Setia,

penyesuaian tarif listrik menjadi isu hangat dalam beberapa bulan terakhir. Sebagaimana diketahui, penyesuaian tarif listrik atau juga disebut Tariff Adjustmet diterapkan setiap 3 bulan dengan mengacu kepada perubahan 4 asumsi makro yaitu kurs, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Patokan Batubara (HPB). Setelah sejak 2017 tarif listrik tidak disesuaikan, tarif listrik triwulan III tahun 2022 kembali disesuaikan.

Dalam konferensi pers tanggal 13 Juni 2022, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengungkapkan penyesuaian tarif listrik tersebut hanya menasar golongan mampu, yakni golongan Rumah Tangga dengan daya mulai 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan golongan Pemerintah (P1, P2, dan P3). Ia lantas menegaskan pelanggan golongan bersubsidi tidak terkena penyesuaian tarif listrik seiring dengan komitmen Pemerintah melindungi masyarakat dengan tetap memberikan subsidi listrik kepada yang berhak.

Topik mengenai penyesuaian tarif listrik menjadi Tajuk Utama pada Buletin Ketenagalistrikan edisi Juni 2022 ini. Bahasan selanjutnya adalah Liputan Khusus dari Riau mengenai peresmian PLTGU Riau oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Adanya PLTGU Riau ini memperkuat keandalan listrik di Sumatera.

Pada rubrik Warta Kita, beberapa isu diangkat mulai dari pasokan listrik saat Idul Fitri 1443 H, presidensi G20, hingga prestasi membanggakan yang ditorehkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang meraih Penghargaan 15 Peserta Terbaik pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2022.

Selamat membaca!

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat Teknis :

1. Font penulisan naskah menggunakan Arial
2. Ukuran font yang digunakan 12
3. Jarak spasi penulisan 1,5
4. Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata

Syarat Umum:

1. Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
2. Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3. Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
4. Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6. Naskah dikirim melalui email ke infogatrik@esdm.go.id
7. Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan caption
8. Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9. Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

DAFTAR ISI

BULETIN

KETENAGALISTRIKAN

Tajuk Rencana

- 6** Penerapan Tarif Listrik Adjustment Sama Sekali Tidak Menyentuh Masyarakat Tidak Mampu
- 8** Pemerintah Terapkan Penyesuaian Tarif Listrik kepada Golongan Masyarakat Mampu Berdaya 3.500 VA ke Atas dan Golongan Pemerintah
- 10** Dirjen Gatrik: Penyesuaian Tarif Listrik Hanya Untuk Rumah Tangga Mampu

Liputan Khusus

- 12** Menteri ESDM Resmikan PLTGU Riau, Biaya Produksi Listrik Sumatera Lebih Murah dan Bersih
- 14** Resmikan PLGTU Riau, Menteri ESDM: Pasokan Listrik Sumatera Tambah Andal

Warta Kita

- 16** Transisi Energi Perlu Dukungan Berbagai Pihak
- 17** Ditjen Ketenagalistrikan Peroleh Penghargaan Pengaduan Layanan Publik

- 18** Pentingnya Teknologi Digital Dalam Hadapi Era Revolusi Industri 4.0
- 20** Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Transisi Energi
- 22** Pemerintah Pastikan Tarif Listrik Harus Terjangkau
- 24** Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Luncurkan Website Perpustakaan
- 26** Pemerintah Terus Berupaya Mengurangi Emisi Karbon Untuk Transisi Energi
- 28** Sesditjen Gatrik: Manajemen Risiko Agar Menjadi Habit dalam Perencanaan Kegiatan
- 30** Pembangkit Listrik Wajib terapkan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan
- 32** Transisi Energi Negara Kepulauan Membutuhkan Kerjasama Antar Negara
- 34** Dirjen Gatrik: Halalbihalal Penyemangat Kerja Baik dan Produktif
- 36** Ditjen Ketenagalistrikan Pantau Pasokan Listrik Lewat Posko Nasional ESDM
- 37** Posko Nasional ESDM Idul Fitri Resmi Ditutup, Pasokan Listrik Terpantau Aman
- 38** Ini Prinsip Utama Indonesia Capai Akses Energi Berkelanjutan
- 40** Presidensi G20 Perkuat Pencapaian Akses Energi Global
- 42** Komitmen Ditjen Ketenagalistrikan Tolak Gratifikasi
- 44** Kejar NZE, Pemerintah Terus Mendorong Pemanfaatan EBT di Indonesia

- 46** Sinergi Pemerintah-DPR untuk Listrik Perdesaan di Kalimantan Tengah
- 48** Diskusi Katadata, KESDM Komitmen Kurangi Pemanfaatan Fosil
- 50** Pengaduan Publik di Ditjen Gatrik Diselesaikan dengan "Cecep"

Kolom

- 52** Tarif Listrik Berkeadilan dan Subsidi Tepat Sasaran Melalui Penerapan Tariff Adjustment

Galeri

- 56** Peresmian PLTGU Riau

Daftar Regulasi

- 58** Daftar Regulasi Koleksi Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan Semester 1 Tahun 2022

PENERAPAN TARIF LISTRIK ADJUSTMENT

SAMA SEKALI TIDAK MENYENTUH MASYARAKAT TIDAK MAMPU



Konferensi pers Tariff Adjustment, Ruang Sarulla KESDM - Jakarta, Senin (13/06/2022).



“ Untuk golongan yang bersubsidi, itu sama sekali tidak kita sentuh, nengok saja tidak, karena kita masih harus melindungi saudara-saudara kita, yang tidak bersubsidi pun R1 itu sama sekali tidak dipertimbangkan untuk dinaikkan ”

Rida Mulyana

Pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (*Tariff Adjustment*) kepada golongan pelanggan rumah ekonomi mampu berdaya 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan golongan Pemerintah (P1, P2, dan P3) pada Triwulan III tahun 2022. Pengean tarif keekonomian ini hanya untuk sebagian golongan pelanggan non subsidi dari golongan pelanggan rumah tangga ekonomi mampu yang tidak seharusnya mendapat subsidi atau bantuan. Sementara itu, masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

"Kita memerlukan *tariff adjustment* salah satunya dalam rangka untuk *sharing burden* dan kita sekaligus mengkoreksi bantuan Pemerintah agar lebih tepat sasaran, kita melakukan koreksi untuk lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan dan diputuskan akan diberlakukan kepada golongan pelanggan Rumah Tangga berdaya mulai 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan golongan Pemerintah (P1, P2, dan P3)," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, Senin (13/22).



Penyesuaian tarif listrik ini dipastikan Rida tidak akan menyentuh masyarakat kurang mampu yang masih memerlukan bantuan Pemerintah. "Untuk golongan yang bersubsidi, itu sama sekali tidak kita sentuh, nengok saja tidak, karena kita masih harus melindungi saudara-saudara kita, yang tidak bersubsidi pun R1 itu sama sekali tidak dipertimbangkan untuk dinaikkan. Jadi untuk R1 sampai 2.200 VA kita tidak sesuaikan tarifnya," tegas Rida.

Kepastian untuk melindungi pelanggan kurang mampu senada diungkapkan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, untuk menjaga dan melindungi daya beli masyarakat dan juga mengendalikan inflasi, maka sejak tahun 2017 itu Pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan tarif listrik yaitu dengan menghentikan proses yang namanya *Automatic Tariff Adjustment*.

"Konsekuensi yang timbul akibat penghentian *Automatic Tariff Adjustment*, Pemerintah melalui PLN sudah mengeluarkan subsidi sebesar 243 triliun sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, tahun 2022 sedang berjalan dan ditambah kompensasi sebesar Rp94 triliun dengan tujuan secara filosofis untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap tinggi dan mengendalikan inflasi agar tetap rendah," ujar Darmawan.



Bantuan yang sudah dikeluarkan tersebut lanjut Darmawan, harus tepat sasaran yakni hanya kepada keluarga yang berhak menerima bantuan dan bukan golongan pelanggan rumah tangga mampu yang memiliki daya listrik 3500 VA s.d 5.500 VA (R2), 6.600 VA ke atas (R3). Total kompensasi yang tidak tepat sasaran mencapai Rp4 triliun.

Darmawan menjelaskan, dari setiap kwh listrik yang disalurkan ke rumah tangga dengan ekonomi mampu ini ada komponen bantuan Pemerintah yaitu sebesar Rp255 per Kwh karena biaya tarif listrik saat ini adalah Rp1.444,70 per kwh, sedangkan biaya pokok produksi dengan adanya faktor eksternal akan meningkat menjadi Rp1,699,53 per kwh.

"Porsi Rp255 per Kwh yang disalurkan kepada rumah tangga ekonomi mampu

inilah yang kemudian diputuskan oleh Pemerintah yang secara *philosophies* ini adalah bantuan Pemerintah yang kurang tepat sasaran, ini akan dikembalikan lagi dan bantuan Pemerintah seharusnya diberikan kepada keluarga yang betul-betul membutuhkan yakni keluarga tidak mampu," jelas Darmawan.

Darmawan kembali menambahkan, untuk pelanggan rumah tangga ekonomi mampu golongan R2 yang berjumlah 1,7 juta pelanggan dan juga pelanggan golongan R3, rumah tangga ekonomi mampu daya terpasang 6.600 VA ke atas yang jumlahnya 316 ribu pelanggan, tarifnya akan disesuaikan sebagaimana keekonomian. Artinya, pelanggan tersebut sebelumnya menerima bantuan Rp255 per Kwh dari Pemerintah, maka bantuan ini direalokasikan untuk program-program yang langsung mengenai masyarakat kurang mampu. Dengan komponen kompensasi yang direalokasikan tersebut, tarif yang sebelumnya dibantu Pemerintah yaitu Rp1.444,70 per kwh dikoreksi menjadi tarif yang berbasis pada keekonomian yaitu Rp 1,699,53 per kwh.

"Untuk rumah tangga dengan daya dibawah 3.500 VA yaitu keluarga ekonomi yang memang perlu dibantu dan membutuhkan dukungan Pemerintah sebanyak 74,2 juta pelanggan tidak mengalami perubahan dan terus mendapatkan dukungan bantuan dari Pemerintah dalam rangka, satu menjaga daya beli masyarakat dan kedua dalam rangka menekan laju inflasi agar tetap rendah. dan ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat," tukas Darmawan.(SF)

PEMERINTAH TERAPKAN PENYESUAIAN TARIF LISTRIK

KEPADA GOLONGAN MASYARAKAT MAMPU BERDAYA 3.500 VA KE ATAS DAN GOLONGAN PEMERINTAH

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik (*Tariff Adjustment*) triwulan III tahun 2022 atau periode Juli-September 2022. Penyesuaian tarif ini diberlakukan kepada golongan pelanggan Rumah Tangga berdaya mulai 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan golongan Pemerintah (P1, P2, dan P3) yang jumlahnya sekitar 2,5 juta atau 3% dari total pelanggan PT PLN (Persero). Keseluruhannya adalah golongan pelanggan non subsidi.



“Golongan pelanggan Rumah Tangga di bawah 3.500 VA, Bisnis, dan Industri tarifnya tetap. Ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menyampaikan bahwa penerapan *Tariff Adjustment* ini bertujuan untuk mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan. Artinya, masyarakat yang mampu tidak lagi menerima bantuan dari Pemerintah” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, Senin (13/06/2022), di Jakarta.

Rida menegaskan pelanggan golongan bersubsidi tidak terkena penyesuaian tarif listrik. Pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dengan tetap memberikan subsidi listrik kepada yang berhak. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Seperti diketahui, *Tariff Adjustment* diberlakukan sejak 2014 kepada pelanggan non subsidi untuk memastikan subsidi listrik yang tepat sasaran. Pada tahun 2014 hingga 2016, *Tariff Adjustment* diterapkan secara otomatis. Namun dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan daya saing sektor bisnis dan industri sejak tahun 2017 hingga triwulan II/2022, Pemerintah memutuskan *Tariff Adjustment* tidak diterapkan secara otomatis dan ditetapkan tidak berubah meskipun terdapat perubahan kurs, ICP (*Indonesian Crude Price*), inflasi dan harga batubara dibandingkan dengan

yang telah ditetapkan dalam APBN tahun berjalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Nomor 03 Tahun 2020, *Tariff Adjustment* ditetapkan setiap 3 bulan dengan mengacu kepada perubahan 4 asumsi makro yaitu kurs, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Patokan Batubara (HPB).

Perkembangan besaran empat indikator asumsi makro menunjukkan kecenderungan meningkat. Realisasi indikator ekonomi makro rata-rata 3 (tiga) bulan (Februari s.d. April 2022)

sekitar 36%, sehingga perubahan empat indikator asumsi makro ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Pada akhirnya, hal tersebut juga berdampak pada perhitungan *Tariff Adjustment*, Rida mengungkapkan.

Pelanggan Rumah Tangga R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp111.000/bulan untuk pelanggan R2 dan Rp346.000/bulan untuk pelanggan R3. Pelanggan Pemerintah P1 dengan daya

golongan pelanggan R2, R3 dan Pemerintah pada triwulan III tahun 2022 ini berdampak kecil terhadap inflasi sekitar 0,019%. Ia berharap dampak yang kecil terhadap inflasi tersebut dapat turut menjaga daya beli masyarakat.

"Ke depan kemungkinannya apabila sektor bisnis dan industri menengah dan besar telah pulih, dimungkinkan tarif tenaga listrik dapat kembali mengalami perubahan naik ataupun turun melihat perkembangan kurs, ICP, inflasi, dan HPB. Selain itu, efisiensi yang terus dilakukan PLN juga dapat menjadi pemicu turunnya tarif tenaga listrik," tutur Rida. Kementerian ESDM



Suasana Konferensi pers *Tariff Adjustment*, Ruang Sarulla KESDM - Jakarta, Senin (13/06/2022).

yang digunakan dalam penerapan *Tariff Adjustment* Triwulan III Tahun 2022 yaitu kurs Rp14.356/USD (asumsi semula Rp14.350/USD), ICP USD104/Barrel (asumsi semula USD63/Barrel), Inflasi 0,53% (asumsi semula 0,25%), HPB Rp837/kg sama dengan asumsi semula (diterapkan capping harga, realisasi rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) >70 USD/Ton).

"Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik sebesar 33% didominasi oleh biaya bahan bakar, terbesar kedua setelah biaya pembelian tenaga listrik dari swasta

6.600 VA hingga 200 kVA dan P3 tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp978.000/bulan untuk pelanggan P1 dan Rp271.000/bulan untuk pelanggan P3. Pelanggan Pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp1.114,74/kWh menjadi Rp1.522,88/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp38,5 juta/bulan.

Rida mengemukakan bahwa data dari Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan bahwa penyesuaian tarif listrik untuk

berharap PT. PLN (Persero) dapat terus meningkatkan efisiensi operasional dengan berbagai cara, dan terus meningkatkan penjualan tenaga listrik sehingga BPP tenaga listrik per kWh dapat diupayakan turun atau minimal tetap dari tahun sebelumnya.

DIRJEN GATRIK: PENYESUAIAN TARIF LISTRIK HANYA UNTUK RUMAH TANGGA MAMPU

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 3.500 volt ampere (VA) ke atas dan golongan pemerintah pada 1 Juli 2022 mendatang. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) secara *daring*, Jumat (17/06/2022).

"*Tariff adjustment* ini hanya untuk pelanggan rumah tangga R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas. Kelompok pelanggan ini kami yakini termasuk saudara-saudara kita yang dari sisi keekonomian sudah masuk golongan rumah tangga mampu atau mewah," ujar Rida.



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) secara *daring*, Jumat (17/06/2022).

Rida menyebutkan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), terdapat 38 golongan tarif tenaga listrik yang terdiri dari 25 golongan tarif yang diberikan subsidi listrik, dan 13 golongan tarif yang digolongkan sebagai tarif non subsidi.

Rincian 13 golongan tarif Non Subsidi tersebut terdiri dari Rumah Tangga Mampu, Bisnis dan Industri Besar, Pemerintah dan juga layanan khusus.

“Sesuai regulasi yang kami sebutkan tadi, terhadap 13 golongan tarif Non Subsidi diterapkan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*), yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan faktor yang bersifat *uncontrollable*, yaitu kurs, inflasi, ICP dan harga batubara,” ungkap Rida. *Tariff adjustment* ini ditetapkan oleh Direksi PT PLN (Persero) setelah mendapatkan persetujuan Menteri ESDM, dan diumumkan kepada Konsumen 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaannya.

Sesuai kebijakan Pemerintah, *Tariff Adjustment* diberlakukan sejak 2014 kepada pelanggan non subsidi untuk memastikan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Pada tahun 2014 hingga 2016, *Tariff Adjustment* diterapkan secara otomatis.

“*Tariff Adjustment* diterapkan sesuai kondisi empat parameter yang tadi kami sebutkan, sehingga apabila ada penurunan tarif akan ditetapkan turun begitu sebaliknya,” kata Rida.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan daya saing sektor bisnis dan industri sejak tahun 2017 hingga triwulan II/2022, Pemerintah memutuskan *Tariff Adjustment* tidak diterapkan secara otomatis dan ditetapkan tidak berubah (Tarif Tetap) meskipun terdapat perubahan kurs, ICP, inflasi dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam APBN tahun berjalan.

Rida menyebutkan Realisasi kurs yang digunakan dalam perhitungan *tariff adjustment* triwulan I sampai dengan triwulan III 2022 menunjukkan angka yang relatif tidak berubah signifikan dibandingkan dengan asumsi awal Rp14.350/US\$.

Selanjutnya, realisasi ICP yang digunakan dalam perhitungan *tariff adjustment* triwulan I sampai dengan triwulan III 2022 menunjukkan angka yang cenderung meningkat hingga 103,91 US\$/barrel, sedangkan asumsi awal 63 US\$/barrel. Realisasi inflasi yang digunakan dalam perhitungan *tariff adjustment* triwulan I sampai dengan triwulan III 2022 juga menunjukkan angka yang cenderung meningkat hingga 0,53%, sedangkan asumsi awal 0,25%.

“Sedangkan untuk Harga Batubara juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun dengan adanya kebijakan capping Harga Batubara, PT PLN (Persero) tetap membayar dengan harga sebesar 70 US\$/ton atau Rp836,57/kg,” ungkap Rida.

Ia juga menjelaskan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik sebesar 33% didominasi oleh biaya bahan bakar seperti pembelian batubara, gas, BBM dan lainnya. Biaya bahan bakar tersebut merupakan porsi biaya terbesar kedua setelah biaya pembelian tenaga listrik dari swasta sekitar 36%. Dengan perubahan empat indikator makro ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dan pada akhirnya hal tersebut juga berdampak pada perhitungan *Tariff Adjustment*.

“Sekali lagi kami tekankan bahwa, untuk 8 pelanggan non subsidi lainnya tarifnya masih sama dengan tarif yang ditetapkan pada triwulan II tahun 2022. Dan tentu saja untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi, juga masih mendapatkan subsidi atau tidak berubah” kata Rida.

Dukungan PLN

Dalam kesempatan yang sama Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril mengatakan PLN menjalankan penetapan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kita, PLN, menurut Undang-Undang sebagai BUMN tidak boleh rugi, maka tarif listrik untuk masyarakat tidak mampu yang diberikan subsidi itu diberikan kepada kita, dikompensasikan. Misalnya ada selisih dari BPP terhadap harga yang telah ditetapkan tersebut, maka pemerintah akan memberikan kompensasi/memberikan gantinya kepada PLN,” jelas Bob.

Bob menjelaskan PLN siap menjalankan arahan pemerintah untuk menyesuaikan tarif hanya untuk golongan 3500 VA ketas, rumah tangga dan tarif pemerintahan.

“Kami siap menjalankan arahan pemerintah, dan PLN selalu siap mengikuti arahan memperbaiki layanan kita meningkatkan penjualan juga efisiensi untuk di dalam segala bidang dengan digitalisasi dan inovasi-inovasi yang baru,” ujar Bob.

Pemerintah terus mendorong PLN untuk melakukan langkah-langkah efisiensi operasional agar biaya pokok penyediaan dan tarif listrik dapat lebih efisien dan mendorong PLN agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan konsumen.

“Kami dari sisi pemerintah harus terus mendorong PLN untuk meneruskan gerakan program efisiensinya agar kemudian BPP-nya terus turun, yang kedua terus meningkatkan jualannya termasuk di dalamnya meminimasi dampak dari cuaca yang akan menghambat jualannya PLN, serta mendorong PLN untuk senantiasa meningkatkan pelayanan yang makin prima ke setiap pelanggan PLN,” tutup Rida (AT).

MENTERI ESDM RESMIKAN PLTGU RIAU, BIAYA PRODUKSI LISTRIK SUMATERA LEBIH MURAH DAN BERSIH



Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Riau berkapasitas 275 megawatt (MW) di Kawasan Industri Tenayan, Pekanbaru, Riau Kamis (12/05/2022).

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Riau berkapasitas 275 megawatt (MW) yang berlokasi di Kawasan Industri Tenayan, Pekanbaru, Riau pada Kamis (12/5). Pengoperasian pembangkit dipastikan akan memperkuat keandalan pasokan listrik di sistem Sumatera, khususnya sub-sistem Riau, sekaligus mendorong biaya pokok penyediaan (BPP) listrik lebih murah dan lebih bersih.

Harga jual tenaga listrik PLTGU Riau ini adalah USD6,49 sen per kWh atau lebih rendah dari BPP setempat.

"Khusus untuk di wilayah Provinsi Riau, saat ini sudah ada tambahan sebesar 275 MW, tetapi ke depan juga bisa menjadi sentra pengembangan PLTGU dengan melihat sumber daya energi yang ada di Provinsi Riau," ungkap Menteri Arifin.



Sebagaimana diketahui, Pemerintah fokus pada upaya transisi energi. Hal ini merupakan strategi panjang seluruh bangsa di dunia untuk menekan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan mencapai *Net Zero Emission* (NZE), agar dapat meminimalisir perubahan iklim. Untuk itu, saat ini gas dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai jembatan menuju 100% Energi Baru Terbarukan (EBT).

Menurut Menteri ESDM Indonesia masih memiliki potensi gas yang cukup banyak sekaligus menjadi komoditi energi yang penting, terutama dalam mendukung proses transisi energi.

"Emisi yang dikeluarkan dari sumber energi fosil, antara lain batubara, emisi buangnya itu dua kali lipat dibandingkan dengan gas," jelas Menteri ESDM.

Dengan beroperasinya PLTGU Riau, daya mampu sistem kelistrikan Sumatera akan meningkat menjadi 7.266 MW dengan

beban puncak mencapai 6.823 MW, sehingga cadangan sistem kelistrikan Sumatera menjadi 443 MW. PLTGU Riau sendiri dikembangkan oleh PT Medco Racth Power Riau, anak usaha patungan antara PT Medco Power Indonesia bersama RATCH Group Public Company Limited.

"Harus diupayakan, harus bisa menciptakan demand-demand baru agar kita bisa memenuhi kapasitas nasional seoptimum mungkin. Sehingga utilitasnya bisa maksimum," terang Menteri Arifin. Selanjutnya, Menteri ESDM juga menekankan pentingnya harga energi yang terjangkau, selain untuk kepentingan masyarakat, juga untuk kepentingan industri.

"Dengan harga energi listrik yang kompetitif akan memberikan dorongan investasi masuk ke dalam negeri, ini yang penting. Untuk itu, jangan lupakan untuk selalu meningkatkan efisiensi dalam pengoperasian pembangkit" sambung Menteri ESDM.

Kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PLTGU Riau ini dapat melistriki sekitar 360 ribu pelanggan Rumah Tangga dengan daya 900 VA. Tak hanya perkuat pasokan listrik, pembangunan PLTGU ini juga disebut lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang lebih kecil.

"Saya berharap Medco Racth Power bisa mengoperasikan proyek ini dan menjaga pembangkit listrik ini dengan sebaik-baiknya," pungkas Menteri Arifin. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan, pengoperasian pembangkit yang masuk dalam proyek 35 ribu MW ini menjadi bukti keberhasilan kolaborasi strategis antara PLN dengan produsen listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*) dalam penyediaan listrik nasional.

"Ini merupakan hari bersejarah, di mana kita semua dalam proses tiga tahun ini telah bersama-sama dan berkolaborasi hingga pembangunan PLTGU telah berhasil dituntaskan dan kini bisa beroperasi," ujar dia.

Hadirnya PLTGU ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta menjadi titik awal untuk mengoptimalkan potensi daerah. "PLTGU ini beroperasi tentu listrik semakin andal dan berkualitas. Itu artinya PLN semakin siap menyambut masuknya investor dan siap memenuhi peningkatan

konsumsi listrik masyarakat ke depan," terangnya.

Darmawan juga menyatakan kesiapan PLN untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk mendukung kemajuan daerah. "Baik itu pembangunan kawasan ekonomi baru, industri baru, atau juga kawasan industri khusus yang ada dalam perencanaan Provinsi Riau," tambah Darmawan.

Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menyambut baik beroperasinya PLTGU Riau. Ia meyakini kebutuhan listrik di daerahnya akan terus meningkat seiring pembangunan yang dilakukan di daerahnya.

"Pemerintah provinsi Riau memang memiliki target setiap tahunnya untuk membangun infrastruktur kelistrikan agar dapat menerangi desa di seluruh wilayah Provinsi Riau. Kami mengharapkan peremissn PLTGU ini dapat menjadi momen strategis bagi kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Komponen Dalam Negeri Dioptimalkan Berdiri di atas lahan seluas 9,1 hektar, PLTGU Riau masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Dengan investasi sekitar USD290 juta, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di proyek ini mencapai 34% serta mampu membuka lapangan kerja bagi sekitar 2.072 tenaga kerja Indonesia dan 47 warga negara asing. (RZ)



<https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2022/05/pltgu-riau-beroperasi-pln-kolaborasi-percepat-transisi-energi-bersih-di-ri>

RESMIKAN PLGTU RIAU, MENTERI ESDM: PASOKAN LISTRIK SUMATERA TAMBAH ANDAL



Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan dengan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTGU) ini dapat memperkuat keandalan pasokan listrik di sistem Sumatera, khususnya sub-sistem Riau. Hal tersebut disampaikan pada Peresmian PLTGU Riau 275 MW PLTGU Riau yang dikembangkan oleh PT Medco Ratch Power Riau, di Pekanbaru, Tenayan, Kamis (12/05/2022).

"Dengan listrik yang andal diharapkan dapat menarik investor sehingga bisa mendorong tumbuhnya industri menengah dan besar di Pulau Sumatera," ujar Arifin.



Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memantau Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Riau berkapasitas 275 megawatt (MW) di Kawasan Industri Tenayan, Pekanbaru, Riau Kamis (12/5/2022).



Arifin mengapresiasi pembangunan PLTGU Riau 275 MW yang berkomitmen menjaga lingkungan sekitar dengan sistem pembakaran *Dry Low NOx Combuster* sehingga menghasilkan emisi NOx lebih kecil dibandingkan standar.

Ia menyebutkan bahwa gas menjadi energi transisi menuju karbon netral 2060, dan Indonesia memiliki banyak cadangan gas bumi. "Gas merupakan komoditi yang penting, terutama mendukung proses transisi energi menuju *Net Zero Emission (NZE)*," ujar Arifin.

Selanjutnya, dengan adanya tambahan baru 275 MW ke depannya bisa menjadi sentra pengembangan pembangkit tenaga listrik gas uap dengan melihat sumber daya energi di Riau.

Dengan beroperasinya PLTGU Riau, daya mampu sistem kelistrikan Sumatera akan meningkat menjadi 7.266 megawatt (MW) dengan beban puncak mencapai 6.823 MW, sehingga cadangan sistem kelistrikan Sumatera menjadi 443 MW.

Ia berharap PLTGU Riau ini dapat meningkatkan kapasitas penyediaan listrik untuk sistem kelistrikan Sumatera serta meningkatkan keandalan jaringan interkoneksi Sistem Sumatera. Arifin mengucapkan selamat kepada Medco atas pembangunan PLTGU Riau 275 MW yang dilaksanakan relatif cukup singkat dikarenakan adanya kendala pandemic, "Saya juga mengucapkan selamat kepada wakil gubernur atas inisiatif untuk mendorong proyeknya ini dapat bisa diselesaikan guna memenuhi kebutuhan energi listrik, baik daerah sendiri maupun industri di Provinsi Riau. Arifin mengatakan Indonesia berkomitmen melakukan transisi energi antara lain melalui pembangunan pembangkit EBT secara masif untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional.

"Indonesia akan berupaya untuk mencapai target NZE di tahun 2060, berarti di tahun 2060 ada 1,5 Gigaton CO2 yang harus kita lenyapkan," kata Arifin.

Saat ini gas masih dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bridging menuju 100% EBT. Pembangunan pembangkit listrik EBT dimungkinkan untuk dilakukan di luar perincian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN.

"Saya berharap program-proram yang telah direncanakan dalam RUPTL bisa lebih cepat, dengan infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Arifin.

Arifin menyebutkan kapasitas nasional yang dimiliki untuk pembangkit listrik saat ini masih berlebih, untuk itu harus diupayakan untuk bisa *create demand-demand* baru, agar dapat memenuhi kapasitas nasional ini seoptimum mungkin, sehingga utilisasi bisa maksimum. "Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya yang extra terutama PLN, dengan upaya itu, energi baru dan bersih bisa mendapatkan akses untuk bisa masuk," ujar Arifin.

Pembangkit Efisien

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero) mengatakan selain sebagai sumber pasokan, dari sisi operasional, *fuelcost* PLTGU ini akan menjadi lebih efisien dari pembangkit-pembangkit Subsistem Riau. "Kami harap masuknya PLTGU Riau ini akan berdampak pada penurunan BPP," ujar Darmawan.



Darmawan juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri ESDM dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas dukungannya, dan kepada wakil gubernur Riau yang siap mendukung pembangunan daerah.

"Semoga tantangan bisa diselesaikan yaitu membangun pembangkit yang murah dan ramah lingkungan," kata Darmawan. Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution berujar, "Kami mengharapkan peresmian ini dapat menjadi momen strategis bagi kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kebutuhan listrik di kota pekanbaru."

Terakhir, Arifin berpesan kepada PT. Medco Ratch Power Riau selaku pengembang PLTGU Riau dan PT PLN (Persero) agar terus meningkatkan efisiensi khususnya dalam mengontrol konsumsi bahan bakar gas sehingga tarif listrik masyarakat dapat terus terjangkau.

Ia juga berpesan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk terus mendorong pemanfaatan potensi penyediaan gas untuk pembangkit listrik di Provinsi Riau karena Provinsi ini memiliki potensi gas yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan sebagai penyediaan energi setempat.

"Saya ucapkan selamat atas beroperasinya PLTGU Riau 275 MW ini, dan semoga kita bisa terus memiliki energi untuk mengembangkan energi yang dibutuhkan oleh tanah air kita," tutup Arifin. (AT)

TRANSISI ENERGI PERLU DUKUNGAN BERBAGAI PIHAK



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengapresiasi kiprah CIGRE dalam acara Peringatan 100 Tahun CIGRE sekaligus pengumuman pemenang Lomba Penulisan Paper yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Indonesia CIGRE di Jakarta, Rabu, (15/06/2022).

Pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan transisi energi dari fosil menuju energi yang lebih bersih dan minim emisi. Dalam mencapai transisi energi tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dengan dukungan berupa forum-forum diskusi yang dilakukan oleh para experts di bidang kelistrikan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengapresiasi kiprah CIGRE yang selama 100 tahun yang telah menunjukkan eksistensinya di bidang power system.

“Upaya transisi energi di bidang pembangkitan tenaga listrik perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari CIGRE,” ujar Rida dalam acara Peringatan 100 Tahun CIGRE sekaligus pengumuman pemenang Lomba Penulisan Paper yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Indonesia CIGRE di Jakarta, Rabu, (15/06/2022).

Lebih lanjut Rida menjelaskan bahwa melalui CIGRE, para profesional baik dari individual maupun perusahaan dapat lebih siap menghadapi perubahan di masa depan melalui berbagai kegiatan sharing pengalaman dari *experts* di seluruh dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa sebuah wadah organisasi seperti CIGRE bisa dijadikan tempat menaruh harapan dimana inovasi bisa dilahirkan, membangun solusi, dan semangat optimisme bersama dalam membangun kelistrikan.

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan dukungan internasional, pada tahun 2030. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah mencanangkan pengurangan PLTU yang ditandai dengan tidak ada lagi penambahan PLTU baru sebagaimana tertuang dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030.

Sesuai road map NZE, penambahan pembangkit listrik setelah tahun 2030 direncanakan hanya berasal dari EBT. Pada COP26 di Glasgow Skotlandia tahun 2021, Indonesia berkomitmen untuk mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat.

100 Tahun CIGRE

CIGRE merupakan organisasi non profit wadah kolaborasi global para *experts power systems* dunia berbagi pengetahuan dan keahlian yang berpusat di Paris sejak 1921. Ketua Komite Nasional Indonesia CIGRE Herman Darnel Ibrahim menyatakan bahwa CIGRE merupakan komunitas global yang bekerja membangun keahlian praktis, memecahkan masalah, dan tantangan masa depan yang dihadapi sistem tenaga listrik.

Memperingati 100 tahun kiprahnya, CIGRE menyelenggarakan Lomba Penulisan Paper yang dikemukakan oleh para peserta dari kalangan akademisi, praktisi, maupun profesional. Melalui lomba ini diharapkan dapat mendorong transisi energi di Indonesia melalui berbagai inovasi yang tertuang dalam paper.

Rida menyampaikan apresiasi kepada CIGRE sebagai sebagai kegiatan positif dalam mendorong transisi energi. “Semoga dapat terus berkarya dan menjadi mitra Pemerintah dalam mewujudkan percepatan transisi energi melalui berbagai diskusi dan *sharing knowledge* di antara para *experts*,” tutup Rida. (U)

DITJEN KETENAGALISTRIKAN PEROLEH PENGHARGAAN PENGADUAN LAYANAN PUBLIK

Untuk kedua kalinya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerima pengakuan sebagai salah satu peserta terbaik dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (KP4). Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari menerima penghargaan sebagai 15 peserta terbaik Kategori Unit Pengelola Pelayanan Publik (UPP) pada Pengantuggerahan Penghargaan KP4 keempat, Kamis (16/6/2022) di Jakarta.

Menurut Ida, penghargaan ini merupakan komitmen Ditjen Ketenagalistrikan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

"Sesuai arahan Bapak Dirjen, kami berkomitmen meningkatkan kualitas pengaduan pelayanan publik. Masih banyak ruang untuk perbaikan kualitas pelayanan," ujar Ida.

Pengantuggerahan KP4 merupakan acara yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI untuk mengapresiasi dan memberikan contoh praktik baik Kementerian/Lembaga/ Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Ditjen Ketenagalistrikan telah dua kali mengikuti kompetisi KP4 ini dan dua kali menerima penghargaan serupa.

Pengaduan diselesaikan dengan CECEP

Sebelumnya, dalam Evaluasi Lanjutan KP4 yang diselenggarakan secara daring, Jumat, 27 Mei 2022, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan di depan tim evaluator bahwa Ditjen Ketenagalistrikan memiliki



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari menerima penghargaan sebagai 15 peserta terbaik Kategori Unit Pengelola Pelayanan Publik (UPP) pada Pengantuggerahan Penghargaan KP4 keempat, Kamis (16/06/2022) di Jakarta.

prinsip Cepat, Cermat, dan Produktif (CECEP) dalam mengelola pengaduan pelayanan publik.

Pengelolaan pengaduan secara Cepat, Cermat dan Produktif telah dibuktikan dengan berbagai capaian pelaksanaan pengaduan. Cepat, dapat dilihat dari penanganan pengaduan yang cepat sesuai dengan *Service Level Guarantee* (SLG). Rata-rata pengaduan masyarakat Ditjen Ketenagalistrikan di SP4N Lapor ditanggapi dalam waktu 2,1 hari untuk periode tahun 2021. Jauh lebih cepat dari SLG yang ditetapkan di SP4N Lapor yaitu 5 hari.

Cermat, dapat dilihat dengan selesai dan tidak ada satu pun yang terlewat dari semua pengaduan masyarakat yang masuk. Sedangkan Produktif dilihat dari banyaknya pengaduan yang masuk karena sosialisasi yang masif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, namun semua selesai.

"Kami juga produktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui website, media

sosial, dan berbagai webinar untuk memastikan masyarakat bisa melakukan pengaduan pelayanan ketenagalistrikan kepada kami," ujar Rida.

Salah satu contoh pelaksanaan pengaduan secara CECEP adalah pengaduan kepesertaan subsidi listrik. Tim Posko Ditjen Ketenagalistrikan memverifikasi data yang masuk melalui website maupun aplikasi. Jika data pelanggan valid, maka pengaduan akan diteruskan kepada Kementerian Sosial/TNP2K untuk diverifikasi.

"Kami juga berkomitmen terus berinovasi dan melakukan upaya berkelanjutan sesuai dengan rencana aksi yang telah kami susun sehingga kami dapat lebih meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan menjadi bahan perbaikan pelayanan kami di masa yang akan datang, dan tentunya mewujudkan nilai BerAKHLAK," ujar Rida. (AT/PSJ)

PENTINGNYA TEKNOLOGI DIGITAL DALAM HADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana didampingi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Wanhar pada *The 40th ASEAN Senior Officials Meeting on Energy (SOME-40) and its Associated Meetings* secara daring, Selasa (28/06/2022).



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengungkapkan pentingnya teknologi digital dalam melangkah maju menuju Revolusi Industri 4.0 dengan menerapkan teknologi *smart grid*, *cyber security*, serta meningkatkan ekonomi digital.

Hal tersebut disampaikan Rida pada *The 40th ASEAN Senior Officials Meeting on Energy (SOME-40) and its Associated Meetings* secara daring, Selasa (28/06/2022).

“Sebagai Ketua Delegasi Indonesia, saya senang menjadi Vice-Chair dari pertemuan SOME hari ini. Kami berharap pertemuan kami hari ini akan menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi kita semua,” ujar Rida.

Rida mengatakan saat ini pemerintah sedang berada di tengah implementasi *ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation* atau *APAEC Phase II 2021–2025* di mana kita telah menetapkan beberapa target di tahun 2025 dengan mencapai target bauran energi terbarukan seiring dengan pengurangan intensitas energi. Semua target ini membutuhkan upaya kolaboratif dengan lembaga internasional.

Target aspirasi ASEAN pada energi terbarukan dan konservasi energi adalah kewajiban bersama untuk membangun sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan adil untuk semua.

"Karena sebagian dari kita adalah negara kepulauan atau negara pesisir yang mengandalkan interkoneksi maritim internasional, sehingga dampak perubahan iklim global akan sangat dahsyat," ungkap Rida.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien serta mengurangi emisi CO2 adalah strategi yang tepat untuk mengurangi dampak perubahan iklim.



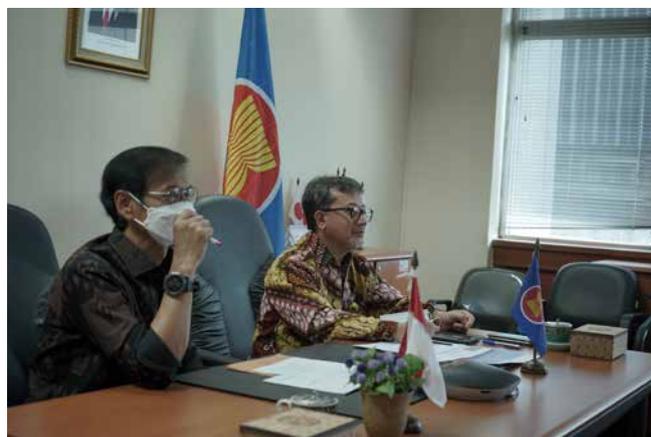
Senior Officials Meeting on Energy (SOME)

Pertemuan SOME-40 ini sedianya dilaksanakan secara fisik di Kamboja, namun dikarenakan pandemi Covid-19 Kamboja selaku tuan rumah menyelenggarakannya secara virtual/daring.

SOME-40 merupakan forum rutin tahunan pejabat tinggi kerjasama energi ASEAN yang membahas capaian dan arahan atas program kerjasama energi regional ASEAN maupun dengan mitra wicara sebagaimana diatur dalam *ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation* (APAEC) 2016-2025 di mana saat ini sudah memasuki



Tahap II (2021-2025). Pertemuan juga akan dihadiri oleh perwakilan 8 (delapan) negara mitra wicara, Sekretariat ASEAN dan *ASEAN Center for Energy* (ACE), serta organisasi internasional *International Energy Agency* (IEA) dan *International Renewable Energy Agency* (IRENA).



Ditjen Ketenagalistrikan selaku focal point kerjasama energi ASEAN mengkoordinasikan kerjasama yang dilaksanakan oleh unit-unit focalpoint di lingkup Kementerian ESDM dan BUMN yang meliputi: ASEAN Power Grid (APG) oleh PLN (Hapua), Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) oleh Pertamina (ASCOPE), Coal and Cleaner Coal Technology (CCT) oleh Ditjen Minerba, Renewable Energy (RE), Civilian Nuclear Energy (CNE), dan Energy Efficiency and Conservation (EE&C) oleh Ditjen EBTKE, Regional Energy Policy and Planning (REPP) oleh Setjen DEN.



"Kami tentu berharap pandemi ini segera berakhir dan dengan senang hati kami akan menyambut Anda semua secara tatap muka dalam rangkaian pertemuan SOME dan AMEM tahun depan di Indonesia dalam keketuaan Indonesia di Asean 2023," tutup Rida. (AT)

SINERGI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TRANSISI ENERGI

Pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya mewujudkan transisi energi dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih. Salah satu upayanya adalah dengan sinergitas antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dengan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali untuk untuk mengimplementasikan Transisi Energi di Pulau Bali. Program tersebut dikemas dalam acara *Bali Electric Vehicle (EV) Goes to Museum Gunung Api Batur-Kintamani* yang berlangsung pada Jumat s.d. Minggu, 24 s.d. 26 Juni 2022 di Bali.

Kegiatan ini merupakan Program Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali untuk untuk memberikan edukasi pentingnya energi bersih serta percepatan implementasi pemanfaatan energi bersih melalui penggunaan PLTS Atap dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Provinsi Bali.

Kegiatan berlangsung diawali dengan parade kendaraan listrik dari Alun-Alun Kota Bangli menuju Hutan Bambu Desa Penglipuran,





dilanjutkan dengan edukasi penggunaan energi bersih di PLTS 1 MWp Kayubih, dan diakhiri kunjungan ke Museum Gunung Api Batur. Subkoordinator Pengelolaan Komunikasi dan Kehumasan Ditjen Ketenagalistrikan Agnes Tania turut menghadiri pembukaan parade kendaraan listrik tersebut.

“Kementerian ESDM mendukung kegiatan sinergi dengan daerah demi mewujudkan percepatan transisi energi”, ujar Agnes mewakili pimpinan Ditjen Ketenagalistrikan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda menyatakan bahwa Bali memiliki Program Kerja Percepatan Implementasi Energi Bersih/ Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai tahapan transisi energi untuk menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih serta mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dengan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali mengimplementasikan Transisi Energi di Pulau Bali dalam acara Bali Electric Vehicle (EV) Goes to Museum Gunung Api Batur-Kintamani di Bali, Jumat s.d. Minggu (24 s.d. 26/06/2022).

“Percepatan yang diselenggarakan dengan tematik Pariwisata dimaksud tentunya memerlukan sinergisitas dan kolaborasi yang mantap antar stakeholders baik pusat dan daerah, baik pemerintah, badan usaha serta masyarakat,” ungkap Ida Bagus.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyatakan bahwa saat ini pengguna kendaraan listrik masih sangat jarang di Kabupaten Bangli, untuk itu program ini sebagai langkah awal guna mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik di Kabupaten Bangli.

Hal ini sejalan dengan isu prioritas yang dibawa pemerintah Indonesia dalam G-20 Summit, salah satunya terkait transisi energi yang berkelanjutan, termasuk percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. (U)



PEMERINTAH PASTIKAN TARIF LISTRIK HARUS TERJANGKAU

Pemerintah memastikan penyediaan listrik kepada masyarakat harus dengan harga yang terjangkau. Untuk itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik.

Dalam sambutan pembukaan webinar Mekanisme Persetujuan Harga Jual dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2022, Rabu (22/6/2022), Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenaglistrikan Jisman Hutajulu, menyampaikan bahwa aturan ini bertujuan memastikan tarif listrik kepada masyarakat lebih terjangkau.

Tata cara penetapan tarif tenaga listrik disebut Jisman sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 47 Tahun 2018. Namun, ketentuan dan pengaturannya perlu disesuaikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana yang semula dibagi antara kewenangan Pemerintah Pusat/ Perintah Daerah menjadi hanya kewenangan Pemerintah Pusat. Perubahan kewenangan tersebut antara lain penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum dan juga penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum.

“Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2022 diharapkan dapat membantu memberikan pedoman kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) saat mengajukan permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, serta penetapan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik,” ujarnya.

Jisman lalu menyebut pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2022 antara lain mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, juga mengenai tata cara permohonan penetapan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik.



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenaglistrikan Jisman Hutajulu memberikan sambutan pembukaan webinar Mekanisme Persetujuan Harga Jual dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2022, Rabu (22/06/2022).

"Selain itu, Peraturan Menteri ini juga mengatur kewajiban pelaporan pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha yang telah ditetapkan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik serta Tarif Tenaga Listrik dan Biaya Lain Yang Terkait secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan secara berkala tiap tiga bulan," lanjut Jisman.

Ia menyampaikan saat ini terdapat 55 pemegang IUPTLU. Dari 55 pemegang wilayah usaha tersebut, terdapat 41 yang telah beroperasi.

"Kami berharap terbitnya regulasi ini dapat memberikan energi positif bagi pemegang IUPTLU agar terus meningkatkan kualitas penyediaan tenaga listrik untuk wilayah usahanya," kata Jisman. Webinar Mekanisme Persetujuan Harga Jual dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik sesuai Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2022 menghadirkan tiga narasumber, yakni Analis Kebijakan Ahli Madya Ferry Triansyah, Analis Kebijakan Ahli Madya Eri Nurcahyanto, dan Direktur Utama PT PLN Batam Nyoman S. Astawa.

Ferry dalam paparannya menyampaikan bahwa pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha agar mengajukan permohonan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik secara tertulis kepada Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Ia menambahkan perlunya melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Persyaratan administratif melingkupi profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual tenaga listrik atau penyewa jaringan tenaga listrik, surat penetapan pengembang atau letter of intent (LoI), dan data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir.

"Sedangkan persyaratan teknis melingkupi informasi terkait kelayakan teknis harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik, dan informasi terkait kelayakan finansial harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik. Selain itu, perlu juga dilampirkan berita acara harga perkiraan sendiri dan berita acara kesepakatan harga," Ferry menjelaskan.

Eri Nurcahyanto dalam paparannya menyampaikan bahwa perubahan pengaturan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2022 dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 47 Tahun 2018, antara lain terkait kewenangan penetapan tarif tenaga listrik yang semula Menteri/Gubernur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Menteri setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam permohonan persetujuan tarif tenaga listrik, Pemegang IUPTL mengajukan secara tertulis kepada Menteri ESDM dengan melampirkan persyaratan administrasi berupa profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha Penetapan Wilayah Usaha dan salinan IUPTLU.

"Selain persyaratan administrasi tersebut, juga melampirkan persyaratan teknis berupa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Perhitungan BPP tenaga listrik, susunan struktur dan/atau golongan tarif tenaga listrik, formula penyesuaian tarif tenaga listrik



(*tariff adjustment*), laporan keuangan, hasil konsultasi publik (*public hearing*)," Eri menjelaskan.

Ia lantas melanjutkan, "Pemegang IUPTLU yang memiliki usaha yang telah mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik harus menyampaikan Laporan Realisasi Tarif Tenaga Listrik, Penjualan Tenaga Listrik, dan BPP Tenaga Listrik secara tertulis kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan secara berkala setiap bulan. Begitu pula dengan pemegang IUPTLU yang penetapan Tarif Tenaga Listrik dan/atau biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik dari gubernur, harus melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan."

Webinar ini dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemegang wilayah usaha ketenagalistrikan, dan badan usaha penyedia tenaga listrik. Webinar terkait kebijakan dan regulasi terbaru diselenggarakan secara rutin oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai upaya sosialisasi kepada publik. (AMH)

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN LUNCURKAN WEBSITE PERPUSTAKAAN

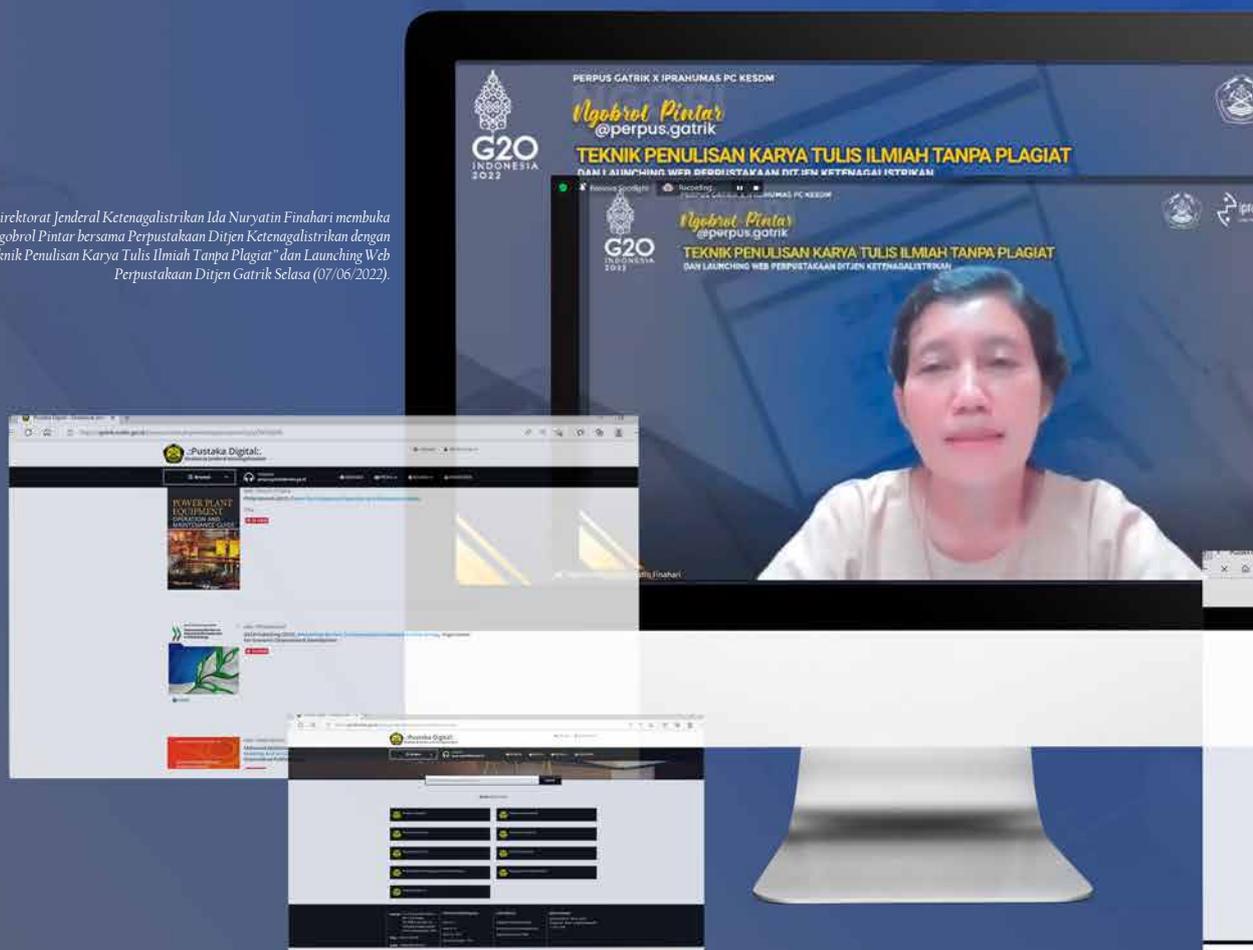
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari meluncurkan *Website* Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan di laman gatrik.esdm.go.id/perpus. Ia berharap website ini dapat meningkatkan pelayanan perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka acara Ngobrol Pintar bersama Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan dengan tema “Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tanpa Plagiat” dan Launching Web Perpustakaan Ditjen Gatrik Selasa (07/06/2022).

“Semoga dengan peluncuran website ini dapat meningkatkan layanan perpustakaan dan peningkatan literasi bagi pegawai dan pemangku kepentingan di subsektor ketenagalistrikan,” ujar Ida.

Website Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan merupakan aplikasi layanan perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan dengan tampilan baru dan berisi fitur-fitur menarik seperti Layanan Baca *Ebook*, Layanan Baca *EJurnal*, Layanan Penelusuran Koleksi, Layanan Repositori Lokal Konten dan Statistik Koleksi.

Dalam kesempatan yang sama Pranata Humas Ahli Madya Ditjen Ketenagalistrikan Pandu Satria Jati mengajak para peserta webinar mengakses dan memanfaatkan koleksi-koleksi Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan secara digital.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari membuka acara Ngobrol Pintar bersama Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan dengan tema “Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tanpa Plagiat” dan Launching Web Perpustakaan Ditjen Gatrik Selasa (07/06/2022).



"Kami mengajak Bapak/Ibu peserta untuk bersama-sama mengakses dan menjadi member Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan, semoga website ini dapat meningkatkan pelayanan Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan," ungkap Pandu.

Ngobrol Pintar bersama Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan

Ngobrol Pintar (NgoPi) bersama Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan merupakan bagian dari Forum Literasi Ketenagalistrikan yang diharapkan dapat menjadi sarana belajar, menambah wawasan, serta peningkatan kemampuan public speaking pegawai yang difasilitasi oleh Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan, Kegiatan NgoPi dengan tema "Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tanpa Plagiat" kali ini bekerja sama dengan Bidang



Riset dan Pengembangan Budaya Literasi Ikatan Pranata Humas Indonesia Pengurus Cabang Kementerian ESDM (Iprahumas PC KESDM).

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Iprahumas PC KESDM sehingga acara ini dapat disebarluaskan melalui jejaring humas pemerintah di Kementerian/Lembaga/Daerah untuk lebih meningkatkan budaya literasi dan kualitas penulisan karya tulis ilmiah," ungkap Ida.

Tema "Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tanpa Plagiat" yang dipaparkan dosen Universitas Surabaya Dr. Ide Bagus Siaputra, S.Psi diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses penyusunan karya tulis ilmiah.

"Hal ini tentu sangat dibutuhkan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), semua sekarang harus mempunyai jabatan fungsional tertentu sehingga sangat diperlukan tidak hanya pranata humas tapi keseluruhan ASN yang mempunyai jabatan fungsional tertentu," ujar Ida.

Ida berharap kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan secara rutin sehingga bisa menjadi jembatan komunikasi dan saling bertukar informasi terkait program-program strategis dan ujungnya dapat meningkatkan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

"Semoga acara di pagi ini lancar kita laksanakan dan menjadi tambahan informasi dan wawasan, tentunya bagi ASN yang hadir pada hari ini," tutup Ida. (AT)



PEMERINTAH TERUS BERUPAYA MENGURANGI EMISI KARBON UNTUK TRANSISI ENERGI

Dalam rangka Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Pembangkitan Tenaga Listrik, Kementerian ESDM saat ini sedang menyusun regulasi tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon pada Pembangkitan Tenaga Listrik. Regulasi tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan komitmen Pemerintah dalam pengendalian emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Dwinugroho pada MGN Summit Series: Energy Summit 2022 “Kolaborasi Global Menuju Transisi Energi” dengan Tema Merebut Peluang Pasar Energi Karbon, Selasa (31/05/2022).

“Dalam rangka Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Pembangkitan Tenaga Listrik, saat ini kami sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Penyelenggaraan NEK pada Pembangkitan Tenaga Listrik,” ujar Nugroho.

Ia mengatakan, setiap pelaku usaha di pembangkitan tenaga listrik wajib menyampaikan pelaporan emisi GRK kepada Ditjen Gatrik melalui APPLE-Gatrik. Pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporan emisi GRK maka tidak diperbolehkan untuk melakukan perdagangan karbon dan seluruh Emisi GRK yang dihasilkan di atas Batas Atas Emisi GRK dikenai pajak karbon.



Nugroho menjelaskan dampak perdagangan karbon di pembangkitan tenaga listrik diantaranya mendorong PLTU untuk melakukan upaya-upaya pengurangan emisi GRK melalui kegiatan seperti pemasangan PLTS *rooftop*, *cofiring*, efisiensi energi, dan kegiatan mitigasi lainnya, dan bagi unit pembangkitan yang memiliki defisit emisi, harus membeli emisi dari unit pembangkit yang memiliki surplus emisi dan/atau offset sebesar seluruh defisit emisi unit pembangkit tersebut. Jika tidak melakukan perdagangan karbon sama sekali atau masih terdapat sisa emisi, maka akan dikenakan pajak karbon.

Kemudian, untuk unit PLTU yang sudah tidak efisien dan memiliki emisi yang tinggi akan diperhitungkan untuk dimasukkan dalam program early retirement PLTU untuk digantikan ke pembangkit EBT.

“Sedangkan peluang perdagangan karbon di pembangkitan tenaga listrik pada pelaksanaannya terdapat potensi insentif yang akan diterima oleh unit PLTU yang menghasilkan emisi di bawah PTE yang telah ditetapkan, karena status defisit unit PLTU lebih besar dari unit surplus dan harga karbon akan meningkat,” ujar Nugroho.



Direktur Teknik dan Lingkungan Dwinugroho pada MGN Summit Series: Energy Summit 2022 "Kolaborasi Global Menuju Transisi Energi" dengan Tema Merebut Peluang Pasar Energi Karbon, Selasa (31/05/2022).



Selanjutnya, terdapat potensi Insentif yang akan diterima oleh pembangkit EBT yang telah mendapatkan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE). Hal tersebut dapat memicu pengembangan pembangkit EBT yang lebih masif.

Dalam rangka memenuhi target kesepakatan dalam Paris Agreement dan melaksanakan komitmen yang sudah disetujui bersama negara-negara di dunia untuk menjaga kenaikan temperatur global tidak melebihi 2 derajat, "Targetnya kita menjaga di 1,5 derajat, tidak lebih dari itu," tegas Nugroho.

Mekanisme Cap and Trade

Pada uji coba pasar karbon ini menerapkan mekanisme *cap and trade* dan *offset*, sehingga diperlukan pembatasan terhadap nilai emisi CO₂ yang dihasilkan. Nilai batas atas (*cap*) emisi GRK akan ditetapkan Pemerintah berdasarkan intensitas emisi GRK rata-rata tertimbang pada tahun 2019.

Nugroho juga memaparkan progress rencana penerapan *carbon credit (cap-trade-tax)* yakni Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Pembangkitan Tenaga Listrik yang terdiri dari penerapan batas atas emisi GRK (BAE) melalui persetujuan teknis (PT-BAE), usulan mekanisme dengan Surat Persetujuan Teknis Emisi (PTU) pada PLTU batubara dan dengan trading, Pelaporan Emisi GRK serta penguatan kerangka transparansi yang akan bekerjasama dengan kementerian terkait seperti KLHK dan Kemenperin.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dewanthi mengatakan pemerintah tidak ingin hanya berjualan karbon, menurutnya Indonesia memiliki target jangka panjang yakni menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Tujuan yang ingin kita capai adalah penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim untuk Indonesia yang berkelanjutan," ujar Laksmi.

Pemerintah serius mewujudkan komitmen *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk itu, pemerintah tengah menyusun peta jalan (*roadmap*) demi menghadapi berbagai tantangan serta risiko perubahan iklim di masa mendatang.

"Tujuan utamanya yaitu membuat suatu iklim harus mengurangi emisi karbon, bagaimana Indonesia menjadi suatu negara yang bersih dan kemudian mengurangi Co₂," tutup Nugroho (AT).



Suasana Rapat Evaluasi Risk Register Tahun 2021 dan Pembahasan Penyusunan Risk Register Tahun 2022, Jumat (20/05/2022), di Bandung.

SESDITJEN GATRIK: MANAJEMEN RISIKO AGAR MENJADI HABIT DALAM PERENCANAAN KEGIATAN

“

Untuk *Risk Register* tahun 2022, kita susun bersama mulai dari tahapan perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi.

Risk Register agar dapat menjadi habit kita di dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan di Ditjen Gatrik

Ida Nuryatin Finahari



Manajemen risiko melalui penyusunan *Risk Register* (daftar risiko) merupakan hal penting dan perlu menjadi habit (kebiasaan) dalam perencanaan kegiatan. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari menegaskan hal tersebut dalam Rapat Evaluasi *Risk Register* Tahun 2021 dan Pembahasan Penyusunan *Risk Register* Tahun 2022, Jumat (20/05/2022), di Bandung. Rapat ini diikuti oleh perwakilan unit eselon II pada Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik).

"Untuk *Risk Register* tahun 2022, kita susun bersama mulai dari tahapan perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi. *Risk Register* agar dapat menjadi habit kita di dalam pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan di Ditjen Gatrik," ujar Ida.

Ia lantas menyoroti belum adanya Satuan Tugas (satgas) Manajemen Risiko di Ditjen Gatrik. Menurutnya, satgas tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh direktorat, tidak bisa hanya dari unit Sekretariat Direktorat Jenderal saja.

"Gatrik agar membentuk Satgas dan pegawai yang menangani manajemen risiko agar certified (bersertifikat)," Ida menyampaikan. Ia lantas meminta Pokja Rencana dan Laporan untuk mengecek kebutuhan pegawai untuk satgas, serta menginventarisir pegawai yang sudah bersertifikat manajemen risiko. Di samping itu, ia

meminta pegawai yang sudah bersertifikat manajemen risiko agar dapat melakukan *sharing session* terkait *Risk Register*.

Senada, Koordinator Rencana dan Laporan Nur Hidayanto menyampaikan perlunya unit teknis dari direktorat untuk terlibat dalam Satgas Manajemen Risiko.

"Saat ini yang ada di Gatrik adalah Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)," tuturnya.

Ia lantas menyampaikan rekomendasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ESDM agar *Risk Register* Ditjen Gatrik tahun 2021 divalidasi, sedangkan *Risk Register* tahun 2022 agar segera difinalisasi dan disosialisasikan ke seluruh unit. Ia juga mengungkapkan Itjen berharap Ditjen Gatrik agar dapat melakukan perbaikan *Risk Register* terkait pemetaan risiko strategis dan risiko operasional.

Ditjen Gatrik telah memiliki pemetaan risiko melalui penyusunan *Risk Register* untuk penyusunan daftar kejadian risiko yang mungkin terjadi, penyebab terjadinya risiko, dampak dan probabilitas terjadinya risiko, serta cara mengatasi dan mengendalikan risiko. Kegiatan ini bertujuan untuk memitigasi dan/atau mengurangi risiko pada sebuah kegiatan. (AMH)



PEMBANGKIT LISTRIK

WAJIB TERAPKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana membuka Webinar "Pengenalan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) dan Sosialisasi Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)" secara daring, Kamis (19/05/2022).



Pemerintah mewajibkan pemilik instalasi tenaga listrik yang berbentuk badan usaha salah satunya pembangkit tenaga listrik untuk memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) sebagai upaya meningkatkan ketaatan dalam penerapan keselamatan ketenagalistrikan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat membuka Webinar "Pengenalan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) dan Sosialisasi Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)" secara daring, Kamis (19/05/2022).

Penerapan SMK2 disebut Rida sebagai bagian dari sistem manajemen badan usaha secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan ketenagalistrikan guna terciptanya keselamatan ketenagalistrikan. Webinar P ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan regulasi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2021 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

"Seperti kita ketahui, tenaga listrik di samping bermanfaat, dapat juga membahayakan bagi masyarakat dan lingkungan hidup, untuk itu pemerintah mengatur kebijakan mengenai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan" ungkap Rida.



Webinar

PENGENALAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (SMK2) DAN SOSIALISASI PENGHARGAAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2)

Kamis, 19 Mei 2022

10.00-12.00 WIB

Link pendaftaran: bit.ly/daftarSMK2



M. P. Dwinugroho

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM



M. Yossy Noval A.

Direktur Operasi-1 PT. Pembangkitan Jawa Bali



Didit Waskito

Koordinator Keluhan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

Gratis dan terbuka untuk umum

Nurma (081291298085)
Anggita (085726008071)

Info Gatrik

Fasilitas :
e-materi dan e-sertifikat

gatrik.esdm.go.id / [f](https://www.facebook.com/infogatrik) / [i](https://www.instagram.com/infogatrik) / [t](https://www.tiktok.com/@infogatrik) / Info Gatrik

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan terdapat tiga tujuan dalam penerapan keselamatan ketenagalistrikan, yaitu andal dan aman bagi instalasi tenaga listrik, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, dan yang terakhir adalah ramah lingkungan.

Pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan tersebut disebut Rida harus memenuhi beberapa aspek diantaranya setiap instalasi

listrik harus memiliki sertifikat laik operasi, setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi, setiap peralatan listrik yang digunakan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia, dan setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho selaku narasumber seminar menyampaikan bahwa pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan wajib diterapkan pada setiap penyediaan instalasi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.

Menurut Dwinugroho, SMK2 diterapkan pada kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang diberlakukan pada instalasi penyediaan tenaga listrik seperti instalasi pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas paling kecil 5 MW, instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan kapasitas daya paling kecil 200 kVA.

Sesuai ketentuan, penerapan SMK2 harus diaudit paling sedikit satu kali dalam setahun oleh internal badan usaha maupun pihak lain yang memiliki kompetensi audit SMK2 dan hasilnya dilaporkan kepada Pemerintah. Berdasarkan laporan tahunan pelaksanaan audit penerapan SMK2 tersebut, Pemerintah memberikan sertifikat ketaatan kepada pemilik instalasi berdasarkan predikat ketaatan atas hasil penilaian ketaatan penerapan SMK2 yang telah dilakukan.

"Pemerintah berkomitmen memberikan penghargaan kepada badan usaha yang taat dalam menerapkan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, serta memberikan sanksi yang tegas bagi badan usaha yang melanggar ketentuan keselamatan ketenagalistrikan," ungkap Dwinugroho.

Direktur Operasi-1 PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) M. Yossy Noval dalam kesempatan yang sama mengatakan kesiapannya mendukung implementasi keselamatan ketenagalistrikan dan implementasi menuju Indonesia yang lebih hijau. Beberapa upaya yang ia terapkan di PJB antara lain dengan melaksanakan *co-firing* di

PLTU batu bara dengan mencampurkan batu bara dengan biomass dikarenakan sifat karbon dari biomassa adalah netral karbon.

"Kami juga mengimplementasikan digital power plant di pembangkit-pembangkit, dimana dengan implementasi *digital power plant* ini kami bisa memantau lebih dalam dan melakukan aksi-aksi lebih cepat sehingga kondisi keandalan peralatan bisa efisien, kondisi pencemaran udara bisa termitigasi dan dapat kami lakukan tindakan-tindakan yang lebih terarah dan lebih awal," ujar Yossy.

Penghargaan Subroto Bidang K2

Penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi sektor energi dan sumber daya mineral, yang diberikan kepada para pemangku kepentingan yang telah melakukan kinerja terbaik dalam memajukan sektor ESDM di Indonesia.

Sejalan dengan upaya meningkatkan budaya keselamatan (safety culture) di bidang ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kembali akan memberikan penghargaan bidang keselamatan ketenagalistrikan tahun 2022. Pelaksanaan penghargaan tersebut akan masuk dalam salah satu bidang Penghargaan Subroto dalam rangkaian Hari Jadi Pertambangan dan Energi. Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan ini ditujukan kepada pemilik atau pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Gas Uap (PLTG/GU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang telah menerapkan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Tahun ini terdapat 27 kategori penghargaan yang dapat diikuti oleh pemilik/pengelola pembangkit sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasinya sesuai *grid code* yang telah ditentukan. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menyampaikan surat keikutsertaan penghargaan keselamatan ketenagalistrikan kepada pemilik/pengelola pembangkit dengan batas waktu pengajuan keikutsertaan pada tanggal 13 Juni 2022.

Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Didit Waskito mengatakan kriteria penilaian penghargaan keselamatan ketenagalistrikan harus memenuhi kualifikasi yang didalamnya memuat pembangkit memiliki Sertifikat Laik Operasi, memiliki IUPTL dan/atau SBU & IUJPTL, unit pembangkit tidak mendapatkan proper lingkungan hidup kategori hitam, serta tidak terjadi instalasi dan/atau kecelakaan kerja selama periode penilaian. Setelah kualifikasi terpenuhi, tahapan selanjutnya adalah penilaian terkait kriteria andal dan aman bagi instalasi, ramah lingkungan, serta aman dari bahaya manusia dan makhluk hidup lainnya.

"Kami harap para pemilik/pengelola pembangkit agar segera melengkapi data dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan," ujar Didit. (AT)



TRANSISI ENERGI NEGARA KEPULAUAN MEMBUTUHKAN KERJASAMA ANTAR NEGARA



Kita perlu bekerja secara kolektif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Transisi energi bagi negara-negara kepulauan sangat penting untuk memitigasi dampak perubahan iklim mulai dari lini depan

RIDA MULYANA

Presidensi G20 di Indonesia bertujuan untuk mendorong transisi energi menuju pemulihan berkelanjutan dan peningkatan produktifitas. Perhatian khusus ditujukan dalam memberikan akses energi kepada negara-negara kepulauan sehingga tidak ada satu pun pulau yang tertinggal.

Transisi energi bagi negara kepulauan sangat penting untuk memitigasi dampak perubahan iklim, perwujudan hal ini membutuhkan kerjasama dari negara-negara di dunia untuk mengatasi tantangan yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam acara G20 Webinar *Series "Assuring Energy Access and Transitions in Archipelagic States"* yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (18/05/2022).

"Kita perlu bekerja secara kolektif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Transisi energi bagi negara-negara kepulauan sangat penting untuk memitigasi dampak perubahan iklim mulai dari lini depan," ungkap Rida.

Rida menjelaskan bahwa negara kepulauan menghadapi tantangan khusus dalam penyaluran akses energi secara universal. Negara kepulauan sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti bencana alam dan dampak perubahan iklim, sehingga mengalami gangguan dalam rantai pasokan energi. Pada saat yang sama, negara-negara kepulauan seringkali memiliki masalah dengan interkoneksi dan sangat bergantung pada bahan bakar fosil impor dan jaringan distribusi. Akibatnya, negara tersebut tertinggal dalam Sustainable Development Goal 7 (SDG 7) khususnya dalam akses energi.

Lebih lanjut Rida menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam perjalanan untuk mencapai akses energi universal seiring dengan agenda transisi energi. Pemerataan akses energi harus dicapai oleh seluruh masyarakat terutama di pulau-pulau terdepan, terluar, dan tertinggal melalui beberapa poin.

"Pertama, pasokan listrik yang memadai, kualitas pasokan listrik, dan harga listrik yang terjangkau. Kedua, untuk target nasional penyediaan listrik di semua wilayah, Indonesia menargetkan rasio elektrifikasi 100% pada akhir tahun 2022. Terakhir, dari sisi pasokan kami telah menetapkan target 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025," ujar Rida menjelaskan.

Dalam kesempatan yang sama, *Co Chair of The Energy Transition Working Group*, G20

Indonesia Prahoru Nurtjahyo menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki perhatian khusus dalam isu usaha penyediaan akses energi bersih dan transisi energi di negara-negara kepulauan.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa energi saat ini telah menjadi kebutuhan pokok untuk meningkatkan aspek sosial ekonomi dan pembangunan yang lebih luas. Kita harus mendorong kebijakan, tindakan, dan strategi yang lebih inovatif untuk meningkatkan ketahanan bagi masyarakat di negara kepulauan." Ungkap Prahoru.

Komitmen Indonesia dalam Mendukung NZE

Indonesia saat ini sedang melakukan transisi energi menuju pemanfaatan dan akses energi yang lebih bersih dalam mendukung komitmen *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal. Dalam mendukung tujuan ini, beberapa tindakan sedang dipersiapkan dan dilaksanakan diantaranya adalah tidak ada tambahan pembangkit listrik tenaga batubara baru kecuali yang sudah dikontrak atau sedang dibangun.

"Penambahan pembangkit setelah tahun 2030 hanya berasal dari Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan. Kami akan memiliki 21 GW pembangkit listrik energi terbarukan tambahan pada tahun 2030 dan dari target ini, kami sudah memiliki listrik 11,1 GW yang didukung oleh sumber energi terbarukan," jelas Rida.

Pemerintah juga tengah melakukan upaya

konversi pembangkit listrik berbahan bakar solar menjadi sumber energi terbarukan, seperti dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik yang akan menghasilkan sekitar 1 GW energi yang lebih bersih. Konektivitas jaringan juga ditingkatkan dalam rangka mendukung mobilisasi sumber energi terbarukan asli ke pusat permintaan.

Upaya lainnya adalah penyediaan lampu hemat energi dengan panel surya skala rumah tangga, tabung listrik, dan stasiun pengisian listrik untuk mendukung akses listrik untuk pulau-pulau terpencil dan terluar. Percepatan elektrifikasi juga diupayakan melalui program instalasi akses listrik baru untuk melistriki lebih dari 192 ribu rumah tangga berpenghasilan rendah yang saat ini tidak memiliki akses langsung ke listrik.

"Semua upaya ini akan menjadi langkah awal menuju masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan. Saya berharap Indonesia dan negara kepulauan lainnya dapat belajar bersama dalam mencapai akses energi dengan transisi energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan," tutup Rida.

Webinar dengan tema "Menjamin Akses Energi dan Transisi Energi Negara Kepulauan" ini diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku tuan rumah G20 bersama dengan *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UN ESCAP). Webinar ini menghadirkan pembicara Internasional untuk berbagi pengalaman dalam program penyediaan akses energi di berbagai negara terutama negara kepulauan. (U)



DIRJEN GATRIK: HALALBIHALAL PENYEMANGAT KERJA BAIK DAN PRODUKTIF

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana berpesan pada pegawai Ditjen Ketenagalistrikan agar bekerja dengan baik dan produktif setelah libur Idulfitri dan cuti bersama tahun 2022. Halalbihalal diantara pegawai disebutkan sebagai penyemangat dalam bekerja. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan pada Halalbihalal di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (09/05/2022).

"Mudah-mudahan ajang ini menjadi penyemangat untuk meluruhkan segala kemangkelan diantara kita semua, dan mudah-mudahan melalui acara ini bisa melepaskan kita semua, agar konsentrasi kita lebih fokus dan produktif dalam bekerja," ujar Rida.

Menurut Rida, momentum halalbihalal ini menjadi awal semangat untuk kembali melaksanakan tugas dengan profesional untuk mencapai target Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2022. Pedoman dalam bekerja sesuai dengan filosofi kerja yang dicanangkan oleh Bapak Menteri ESDM, yaitu Cepat, Cermat, dan Produktif (CeCep) dengan selalu memperhatikan Karakter, Kompetensi, dan Kapabilitas atau 3K.



Halalbihalal di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (09/05/2022).

Perilaku kerja pegawai disebutkan harus menetapkan standar-standar perilaku kerja yang terukur dan diwujudkan dalam nilai-nilai Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

"Dengan BerAKHLAK, kita bisa bekerja dengan baik dan benar, insyaallah berkah," jelas Rida.

Dalam kesempatan ini Rida menyebutkan beberapa pending matters yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, diantaranya deregulasi terkait nilai ekonomi karbon, ekspor impor listrik, konversi pembangkit diesel ke gas, hingga program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Beberapa program unggulan Ditjen Gatrik seperti konversi kompor elpiji ke kompor induksi atau listrik harus dikawal untuk menjaga kemandirian energi.

66



"Karena teman-teman tahu LPG kita impor, tentu saja hal ini menguras devisa, dan itu puluhan triliun, lagi-lagi program harus diimitigasi segala risikonya karena impilkasinya kesana kemari, harus dihitung, harus menjadi agenda utama kita, dan kita harus sudah siap data-datanya," tegas Rida.

Ia menyebutkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun oleh Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha Ketenagalistrikan perlu dimonitoring, diteruskan dan dilaporkan agar apa yang sudah ditetapkan bisa sesuai dengan pencapaiannya. RUPTL ini penting sebab menjadi acuan dalam penyediaan tenaga listrik dalam waktu 10 tahun ke depan. Rida juga mengapresiasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang telah menyelenggarakan acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tanggal 25 April 2022 lalu, tepat sebelum momen Hari Raya Idul Fitri 1443 H.



"Tak lupa kami mengingatkan kepada para pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk menghindari gratifikasi pada momen hari raya ini, dengan berpedoman pada prinsip 4 No's,

yaitu *No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality*," ujar Rida.

Ia juga mengapresiasi kepada Tim Posko Ramadan - Idul Fitri yang telah mengawal pasokan listrik selama periode Idulfitri.

"Sampai saat ini tidak banyak masalah yang terjadi di lapangan, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengawal dan senantiasa melaporkan perkembangan posko setiap harinya," ungkap Rida.

Terakhir, ia mengajak seluruh pegawai untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5 M. Ia juga mengajak seluruh pegawai waspada terhadap kemunculan virus baru yang menyerupai hepatitis yang menyerang anak usia 0 – 16 tahun yang telah merebak di beberapa negara.



"Semoga kita bisa menjaga diri, menjaga keluarga, serta menjaga lingkungan, agar apapun virusnya kita semua bisa terhindar dan terus-terusan dalam lindungan Allah SWT," kata Rida.

Acara halal bihal ini kemudian dilanjutkan dengan prosesi maaf memaafkan dan diikuti seluruh peserta. (AT)



66



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M. P. Dwinugroho pada Konferensi Pers Pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM di Jakarta, Senin, (25/04/2022)

DITJEN KETENAGALISTRIKAN Pantau Pasokan Listrik Lewat Posko Nasional ESDM

Jelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H tahun 2022, pemerintah berupaya untuk menyediakan pasokan energi yang cukup agar masyarakat bisa merayakan Idul Fitri tanpa kendala. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan turut serta melakukan upaya pemantauan ketersediaan dan jaminan pasokan tenaga listrik dengan bergabung dalam Posko Nasional Sektor ESDM yang dilaksanakan selama 17 hari sejak tanggal 25 April – 11 Mei 2022.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M. P. Dwinugroho pada Konferensi Pers Pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM di Jakarta, Senin, (25/4/2022) mengatakan, pasokan tenaga listrik dengan kualitas yang baik, pasokan cukup, dan harga yang terjangkau menjadi semakin penting di tengah kondisi pandemi yang masih dinamis.

“Terutama pasokan listrik menjelang Hari Raya Idul Fitri, diperlukan antisipasi terhadap perubahan pola konsumsi listrik masyarakat,” ujar Nugroho mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Kondisi pasokan tenaga listrik pada Sistem Kelistrikan Nasional disebut Nugroho secara umum berada pada kondisi aman dan cadangan terpenuhi. Pasokan energi primer untuk pembangkit (batubara, gas dan BBM) juga dalam kondisi aman dimana rata-rata stok batubara di atas 20 HOP (Hari Operasi Pembangkit). Berdasarkan data pelaksanaan pemantauan sistem ketenagalistrikan pada tahun 2021, konsumsi tenaga listrik di Indonesia cenderung berada pada angka terendah saat hari H perayaan hari besar keagamaan, termasuk pada Hari Raya Idul Fitri.

Dalam pelaksanaan posko, Ditjen ketenagalistrikan melakukan beberapa upaya antara lain menugaskan pegawai Ditjen Ketenagalistrikan untuk ikut memonitor kondisi pasokan tenaga listrik nasional pada Posko dengan bekerja sama dengan pihak PT PLN (Persero); melaksanakan koordinasi dengan seluruh perangkat PT PLN (Persero) di Indonesia untuk mendapatkan data dan informasi kondisi pasokan tenaga listrik nasional, dan menugaskan Inspektur Ketenagalistrikan untuk dapat turut serta untuk turun ke lapangan dalam rangka penanganan kejadian khusus di sistem kelistrikan nasional.

“Besarnya harapan kami bahwa pelaksanaan Posko Nasional Sektor ESDM ini dapat menjadi perwujudan dari usaha dan kerja bersama dalam hal menjamin pasokan dan ketersediaan energi selama periode Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 M,” ujar Nugroho.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menyatakan bahwa untuk sektor listrik Prognosa Kondisi Sistem Kelistrikan Pada Hari H perayaan Idul Fitri 1443 H/2022 M secara umum dalam Kondisi Aman, dengan kondisi secara umum adalah: Daya mampu pasok : 43.400,08 MW, Perkiraan beban puncak : 32.201,23 MW dan Cadangan operasi : 11.198,85 MW (34,78%).

“Selain melakukan pemantauan energi listrik, Posko Nasional Sektor ESDM juga memiliki tugas untuk memastikan ketersediaan BBM, gas, listrik dan kondisi kebencanaan. Agar selalu update sehingga apabila terjadi kendala dapat ditangani dengan cepat, dan tidak mengganggu aktivitas hari raya masyarakat,” tutup Erika. (U)



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M. P. Dwinugroho resmi menutup Posko Nasional ESDM Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada Rabu (11/05/2022)

POSKO NASIONAL ESDM IDUL FITRI RESMI DITUTUP, PASOKAN LISTRIK TERPANTAU AMAN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi menutup Posko Nasional ESDM Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada Rabu (11/5/2022) dalam konferensi pers di BPH Migas, Jakarta. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan M.P. Dwinugroho menyampaikan kondisi kelistrikan pada Hari Raya Idul Fitri tanggal 2-3 Mei 2022 secara umum dalam kondisi aman. Selain itu, tidak terdapat gangguan pada sistem ketenagalistrikan yang mengakibatkan pemadaman listrik.

"Kondisi pasokan tenaga listrik pada saat, sebelum, dan sesudah Idul Fitri 1443 H untuk sistem kelistrikan di wilayah perusahaan PLN umumnya berada pada kondisi pasokan listrik aman," ujarnya. Nugroho mengatakan daya mampu pasok pada tanggal 3 Mei 2022 sebesar 46.163 MW dengan beban puncak 28.501 MW dan cadangan sistem 17.662 MW atau 61,97%. Sedangkan daya mampu pasok pada tanggal 4 Mei 2022 sebesar 46.780 MW dengan beban puncak 29.253 MW dan cadangan sistem 17.526 MW atau 59,91%.

"Berdasarkan status pada tanggal 3 dan 4 Mei 2022, sebanyak 22 sistem kelistrikan berstatus normal atau cadangan cukup. Tidak ada sistem kelistrikan yang berada pada posisi siaga atau defisit," tuturnya. Ia menjelaskan posisi siaga adalah ketika cadangan lebih kecil dari pembangkit terbesar, sedangkan defisit adalah ketika terjadi pemadaman sebagian bergilir.

Selain pasokan listrik yang terpantau aman, stok BBM selama masa Posko Nasional ESDM juga dinyatakan aman. Secara nasional, total konsumsi BBM pada arus mudik meningkat 26% sedangkan total konsumsi BBM pada arus balik meningkat 12% terhadap sales normal.

Kondisi ketersediaan LPG selama masa Posko Nasional ESDM juga terpantau normal dengan rata-rata volume stok harian LPG nasional adalah 346.461 MT. Dari sektor geologi, Tim Posko melaporkan secara umum kejadian bencana geologi tidak mempengaruhi arus mudik dan arus balik pada Idul Fitri 2022. Meskipun curah hujan di beberapa lokasi tinggi dan terdapat beberapa titik tanah longsor, hal tersebut tidak menimbulkan kejadian gerakan tanah yang signifikan.

Posko Nasional yang dikoordinasikan oleh BPH Migas ini berlangsung selama 17 hari, yaitu sejak tanggal 25 April hingga 11 Mei 2022. Tugas Tim Posko antara lain melakukan pengumpulan/inventarisasi data lapangan serta melakukan koordinasi dan pengawasan lapangan terhadap fasilitas penyediaan dan pendistribusian BBM, gas, dan listrik. Tim juga bertugas menyusun rekomendasi aksi tanggap darurat penanganan kelangkaan pasokan BBM, gas, listrik dan penanganan bencana alam, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan. (AMH)

INI PRINSIP UTAMA INDONESIA CAPAI AKSES ENERGI BERKELANJUTAN

66 Di samping rasio elektrifikasi, pemerintah menetapkan target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025. "Akhir 2021, porsi EBT sudah mencapai 14 persen dalam bauran energi pembangkit listrik,

Rida Mulyana

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengungkapkan keseriusan Indonesia terlibat dalam peningkatan akses energi global yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan pada acara G20 Webinar *Series: Achieving Global Energy Access Goals in the Decade of Action* di Jakarta, Rabu (27/4).

"Pencapaian akses energi universal membutuhkan kerja ekstra dan kerjasama *multistakeholder*, termasuk dengan memperhatikan isu gender dan inklusivitas," kata Rida.





Suasana acara G20 Webinar Series: Achieving Global Energy Access Goals in the Decade of Action di Jakarta, Rabu (27/04/2022).

Rida menyoroti implementasi tiga prinsip utama dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu pasokan listrik yang memadai, kualitas pasokan listrik yang diterima, dan harga listrik yang terjangkau.

Akses energi di Indonesia, sambung Rida, salah satunya dapat direfleksikan dengan capaian rasio elektrifikasi. Hingga tahun 2021, rasio elektrifikasi (RE) Indonesia telah mencapai 99,45 persen, sementara rasio desa berlistrik (RDB) sudah pada level 99,62 persen. "Kami menargetkan penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia dengan capaian 100% RE di akhir 2022," ungkapnya.

Di samping rasio elektrifikasi, pemerintah menetapkan target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025. "Akhir 2021, porsi EBT sudah mencapai 14 persen dalam bauran energi pembangkit listrik," jelas Rida.

Komitmen Indonesia, sambung Rida, menuju transisi energi bersih diproyeksikan sepenuhnya dengan implementasi dekarbonisasi pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Beberapa kebijakan yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah diantaranya tidak ada penambahan pembangkit listrik berbasis batubara kecuali yang sudah berkontrak atau sedang kontruksi.

Selanjutnya, terdapat penambahan pembangkit listrik dari sumber berbasis EBT. "Kami tengah memiliki tambahan 21 Giga Watt (GW) pembangkit listrik energi terbarukan tambahan di tahun 2030. Dari target ini, kami sudah memiliki listrik 11,1 GW," ungkap Rida.

Selain itu, Indonesia juga menerapkan kebijakan konversi pembangkit listrik berbahan bakar solar menjadi pembangkit EBT, seperti PLT Surya *Fotovoltaik* yang akan memproduksi sekitar 1 GW energi yang lebih bersih.

Ada juga meningkatkan konektivitas jaringan untuk memobilisasi sumber EBT ke pusat-pusat permintaan (*demand centers*) dan mempercepat elektrifikasi melalui program instalasi akses listrik baru. "Kami sudah melistriki lebih dari 192 ribu rumah tangga berpenghasilan rendah yang saat ini tidak memiliki akses langsung ke listrik," tegas Rida.

Melalui tebosan kebijakan tersebut, Rida berharap menjadi langkah awal menuju masa depan energi Indonesia yang lebih berkelanjutan. "Saya berharap Indonesia dan negara-negara lain dapat belajar bersama dalam mencapai akses energi universal dan transisi energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan," pungkas Rida. (NA)

PRESIDENSI G20

PERKUAT PENCAPAIAN AKSES ENERGI GLOBAL

Pemerintah berharap Indonesia dan negara-negara lain dapat sama-sama belajar dalam mencapai akses energi global dan transisi energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat membuka *Webinar Series G20, Achieving Global Energy Access Goals in the Decade of Actions*, Rabu (27/04/2022).

Webinar dengan tema "Mencapai Tujuan Akses Energi Global dalam Satu Dekade Implementasi" ini diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku tuan rumah G20 bersama dengan *Sustainable Energy for All (SEforALL)*. Webinar ini menghadirkan pembicara Internasional untuk berbagi pengalaman dalam program penyediaan akses energi di berbagai negara.

“

Transisi energi berkelanjutan merupakan salah satu tema dalam Kepresidenan Indonesia G20, yang juga menekankan pada penyediaan akses energi sebagai prasyarat yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pulau-pulau terpencil dan terluar

”

RIDA MULYANA



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana membuka Webinar Series G20, *Achieving Global Energy Access Goals in the Decade of Actions*, Rabu (27/04/2022).

“Saya sangat senang bahwa kita dapat berkumpul secara virtual untuk mendiskusikan bagaimana mencapai akses energi global melalui ambisi kita terhadap Kesepakatan Global Percepatan Transisi Energi,” ujar Rida.

Akses energi disebut Rida telah menjadi isu prioritas yang penting di dalam G20 mengingat signifikansi dampaknya dalam mencapai tujuan dari Sustainable Development Goals-7 (SDG7). Penyediaan aksesibilitas energi di dalam suatu negara berperan krusial dalam mendorong pemulihan ekonomi negara tersebut dari pandemi secara inklusif dan berkelanjutan. Keberadaan akses energi yang bersih dan berkelanjutan juga penting untuk mencegah krisis energi di masa depan yang mungkin timbul secara global.

Presidensi G20 tahun ini menggarisbawahi bahwa untuk dapat mendukung penyediaan akses energi bersih berupa akses memasak dan listrik bersih diperlukan kerjasama internasional multi-level antara negara G20. “Transisi energi berkelanjutan merupakan salah satu tema dalam Kepresidenan Indonesia G20, yang juga menekankan pada penyediaan akses energi sebagai prasyarat yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pulau-pulau terpencil dan terluar,” ucap Rida.

Mebutuhkan Dukungan Pemangku Kepentingan

Untuk mencapai akses energi global dibutuhkan upaya ekstra dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan dari berbagai negara. Indonesia disebut Rida sedang dalam perjalanan untuk mencapai akses energi global. Poin pertama yang menurutnya penting adalah tiga prinsip utama yaitu kecukupan pasokan listrik, kualitas pasokan listrik, dan harga listrik yang terjangkau.

"Indonesia telah menetapkan target 23 persen energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025. Pada akhir tahun 2021, kami telah mencapai 14 persen pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional kami untuk pembangkit listrik," ucap Rida.

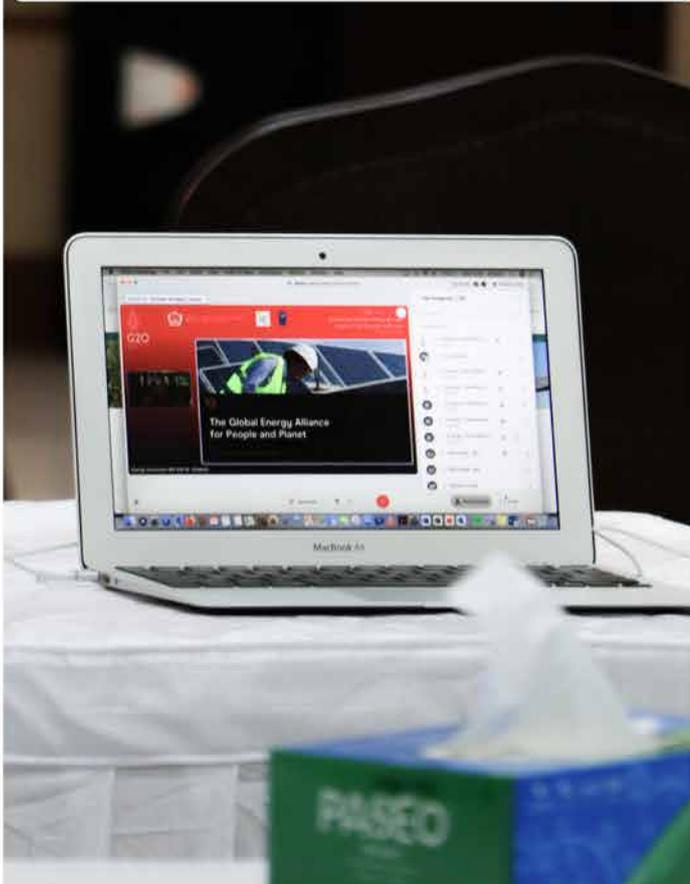
Saat ini Indonesia sedang bertransisi menuju sumber daya energi yang lebih bersih dan diproyeksikan akan sepenuhnya terdekarbonisasi pada tahun 2060 atau lebih awal. Untuk tujuan ini, berbagai upaya tengah disiapkan dan dilaksanakan, seperti tidak ada tambahan pembangkit listrik tenaga batubara baru kecuali yang sudah dikontrak atau sedang dibangun dan penambahan pembangkit setelah tahun 2030 hanya berasal dari EBT. Kementerian ESDM sendiri disebut akan memiliki tambahan 21 GW pembangkit listrik energi terbarukan pada tahun 2030.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengkonversi pembangkit listrik berbahan bakar diesel menjadi sumber energi terbarukan seperti dari tenaga surya yang berpotensi menghasilkan sekitar 1 GW energi yang lebih bersih.

Diskusi dalam webinar ini mengarah kepada G20 yang memiliki potensi besar sebagai aktor kunci dalam mendorong pencapaian akses energi dalam dekade ini. Pertumbuhan ekonomi yang layak dan prospek pasar yang menjanjikan dikombinasikan dengan inovasi dalam bisnis, teknologi, dan pembiayaan akan merangsang investasi lebih lanjut dan kemitraan internasional dalam akses energi berkelanjutan.

Webinar ini memperkuat rekomendasi, praktik, dan pengalaman dalam akses energi berkelanjutan sebagai dukungan ETWG G20 di tingkat Menteri. Harapannya, kebutuhan ini juga dapat dipromosikan ke forum Pemimpin G20 sebagai bagian integral dari Strategi Komprehensif G20 untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Global.

"Saya berharap webinar hari ini memungkinkan kita untuk bertukar informasi dan belajar dari praktik terbaik satu sama lain tentang bagaimana berkontribusi lebih signifikan terhadap pencapaian akses energi global," tutup Rida (AT)



“Terkait gratifikasi, itu menyangkut Karakter, Kompetensi dan Kapabilitas (3K), ketiganya saya pegang betul, dan kalau dipilih mana yang saya tentukan adalah karakternya”

RIDA MULYANA

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan sambutan dalam Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing System (WBS) dan Benturan Kepentingan yang diselenggarakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Senin (25/04/2022).

KOMITMEN DITJEN KETENAGALISTRIKAN TOLAK GRATIFIKASI



Segep pimpinan dan pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berkomitmen menolak segala bentuk gratifikasi yang mengganggu integritas dalam pelayanan publik. Untuk itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengapresiasi pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing System (WBS) dan Benturan Kepentingan yang diselenggarakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Senin (25/04/2022).

“Saya mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi ini yang bertujuan memberikan pemahaman dan meningkatkan kepatuhan pelaporan mengenai gratifikasi, serta sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan,” ujar Rida.

Rida menyampaikan, waktu pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan mendekati Hari Raya Idul Fitri 1443 H ini dianggap tepat mengingat pada hari-hari besar keagamaan terdapat potensi-potensi rawan pemberian dan penerimaan gratifikasi yang secara aturan tidak boleh dilakukan.



Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 399.K/TL.01/DJL.1/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Pembentukan UPG ini merupakan upaya dalam pembangunan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan.

Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

Sosialisasi yang mengundang Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Inspektur Jenderal Kementerian ESDM sebagai narasumber ini tidak hanya ditujukan kepada pejabat dan pegawai Ditjen Ketenagalistrikan, namun juga mengundang para pemangku kepentingan yang setiap hari berinteraksi

Rida mengingatkan kembali bahwa dalam melaksanakan pelayanan dan membangun Zona Integritas, pimpinan dan seluruh pegawai Ditjen Ketenagalistrikan memiliki prinsip 4 *NOs* atau empat tidak, yaitu: *NO Bribery* (tidak boleh ada suap-menyuap), *NO Kickback* (tidak boleh ada uang komisi), *NO Gift* (tidak boleh ada hadiah yang tak wajar), dan *NO Luxurious hospitality* (tidak boleh ada jamuan mewah/berlebihan).

Ia berharap empat prinsip tersebut dapat ditaati oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri yang rawan akan pemberian dan penerimaan gratifikasi.

Putus Mata Rantai Gratifikasi!

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari menyampaikan bahwa sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait aturan-aturan pengendalian gratifikasi secara komprehensif, serta dapat meningkatkan kesadaran anti gratifikasi sehingga pelayanan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat lebih profesional.

Ida mengatakan, mata rantai gratifikasi harus diputus supaya tidak berlanjut ke generasi penerus. Dengan memutus mata rantai gratifikasi, maka akan menuju arah baru yang dibangun dari nilai integritas, kepercayaan dan keadilan.

Salah satu upaya Kementerian ESDM dalam memutus mata rantai gratifikasi adalah dengan menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian ESDM. Di dalamnya telah diatur tentang apa itu gratifikasi, bagaimana ruang lingkupnya, kewajiban dan larangan serta kategori gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, serta penanganan laporan gratifikasi.

Kasatgas Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) KPK RI Mutiara Carina Rizky Artha sebagai narasumber sosialisasi mengatakan bahwa gratifikasi itu punya dampak yang tidak main-main. Meskipun kecil, hal ini dapat mempengaruhi mentalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Karena berawal dari sesuatu yang kecil-kecil, mungkin hanya uang seratus ribu, mungkin hanya makanan kering, tapi ini terus menerus, dan secara tidak langsung ini akan mempengaruhi mental kita, mental pengemis,” ujar Mutiara.

Dalam kesempatan ini juga disosialisasikan terkait pengaduan masyarakat berbasis online melalui *wistleblowing system* (WBS) dan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian ESDM yang disampaikan oleh Auditor Madya selaku Koordinator Penanganan WBS dan Gratifikasi Inspektorat Jenderal KESDM Bayu Dewanto.

Menurut Rida, ada tiga prinsip utama yang selalu ia ingatkan kepada seluruh staf dalam berbagai kesempatan. Tiga prinsip yang penting dimiliki seorang ASN menurutnya adalah Karakter, Kapasitas, dan Kapabilitas (3K). Karakter disebutnya sebagai dasar dalam memberikan pelayanan publik. Untuk itu ia terus mengingatkan agar seluruh pegawai memiliki karakter yang disebut dengan integritas. Kapasitas atau pendidikan serta kapabilitas atau kemampuan teknis tentu penting, namun apabila kehilangan karakter akan sulit untuk diperbaiki.

“Terkait gratifikasi, itu menyangkut Karakter, Kompetensi dan Kapabilitas (3K), ketiganya saya pegang betul, dan kalau dipilih mana yang saya tentukan adalah karakternya,” ujar Rida.

Rida juga berpesan agar setiap bekerja lakukan dengan Baik, Benar, dan Berkah (3B), “Agar ke depannya selalu aman dan selamat, ujung-ujungnya bahagia. Apa yang dicari, kecuali hanya kebahagiaan,” tutup Rida. (AT)

KEJAR NZE, PEMERINTAH TERUS MENDORONG PEMANFAATAN EBT DI INDONESIA

Pemerintah mengapresiasi *Institute for Essential Services Reform* (IESR) sebagai think tank acara *Solar Summit 2022*, dan tentunya para deklarator GigaWatt yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemanfaatan energi surya di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial dalam acara *Indonesia Solar Summit 2022* yang dilaksanakan secara *hybrid*, Selasa (19/04/2022).

"Saya mengapresiasi IESR yang telah bekerja sama dengan Kementerian ESDM dalam menyelenggarakan *Indonesia Solar Summit 2022*," ujar Ego.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan dukungan internasional, pada tahun 2030. Dan untuk menjawab isu global yang terus berkembang, pada COP26 tahun lalu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.



Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial dalam acara Indonesia Solar Summit 2022 yang dilaksanakan secara hybrid, Selasa (19/04/2022).

Ego mengatakan upaya untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca adalah melalui transisi energi dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang ditargetkan sebesar 23% pada tahun 2025. Waktu untuk pencapaian target ini semakin dekat, sedangkan kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2021 baru mencapai 11,7%.

Ia mengatakan diperlukan strategi untuk mempercepat capaian target EBT, antara lain memprioritaskan pengembangan Energi Surya dengan pertimbangan besarnya potensi energi surya yang dimiliki oleh Indonesia yaitu lebih dari 3.200 GW atau 89% dari total potensi energi terbarukan.

Salah satu upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah adalah dengan mengesahkan *Green RUPTL 2021 – 2030* dimana porsi EBT akan mencapai 20,9 GW pada tahun 2030, dengan total penambahan kapasitas Solar PV mencapai 4,68 GW.

"Selain itu, pada roadmap transisi energi Indonesia untuk mencapai NZE pada tahun 2060, energi surya akan berperan penting dalam penyediaan listrik nasional, dimana dari 587 GW kapasitas pembangkit EBT, sebesar 361 GW atau lebih dari 60% akan berasal dari energi surya," ungkap Ego.

Saat ini, Pemerintah memiliki 3 program besar energi surya, yaitu PLTS Atap dengan target 3,61 GW pada tahun 2025 dan PLTS *Ground Mounted* skala besar serta PLTS terapung di 271 lokasi dengan potensi sekitar 27 GW. Indonesia juga memiliki peluang yang besar untuk melakukan ekspor listrik yang berasal dari energi surya, ke negara anggota ASEAN, seperti Singapura.

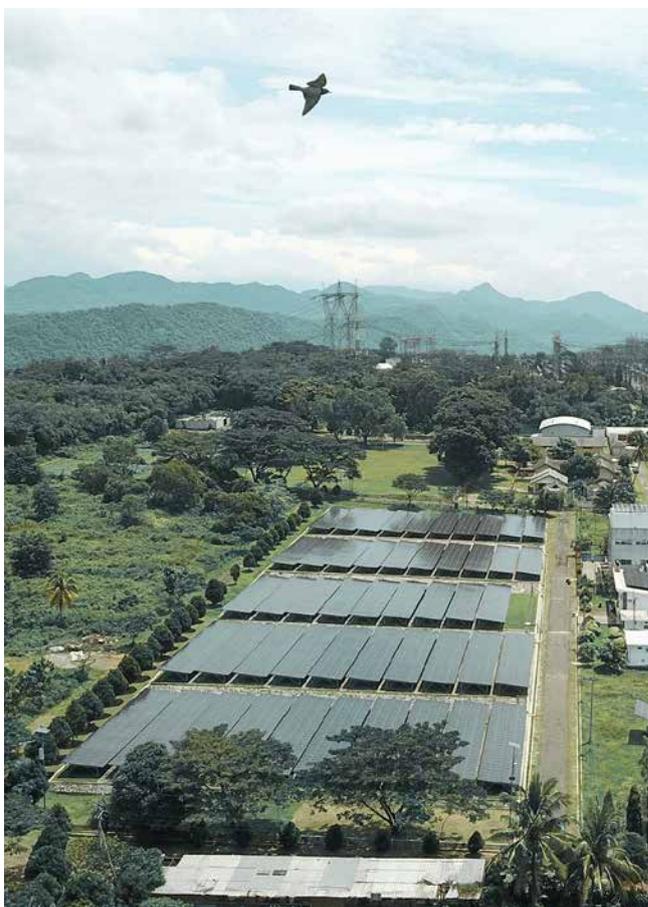


Untuk mengimplementasikan program-program ini, membutuhkan kontribusi dari banyak pihak, tidak hanya Pemerintah, pemegang wilayah usaha, maupun pengembang energi terbarukan, tetapi juga para pengguna energi, seperti sektor komersial dan industri.

"PLTS Atap merupakan salah satu *quick wins* percepatan pemanfaatan energi surya melalui kontribusi langsung dari para pengguna energi, khususnya bagi industri untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin kuat terhadap produk hijau (*green product*)," kata Ego.

Dukungan dari manufaktur lokal juga sangat diperlukan untuk memenuhi TKDN dan memberikan manfaat yang besar untuk dalam negeri terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja. Disamping itu aspek kemudahan akses pembiayaan murah, insentif, dan fasilitas pembiayaan lainnya sangat penting untuk memberikan kelayakan finansial dan meningkatkan investasi energi terbarukan seperti PLTS.

"Saya berharap acara *Indonesia Solar Summit 2022* dapat membuka pasar energi surya di Indonesia, dan dapat menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk mempercepat pemanfaatan PLTS dalam rangka mencapai target bauran EBT dan *Net Zero Emission*," tutup Ego. (AT)



SINERGI PEMERINTAH-DPR UNTUK LISTRIK PERDESAAN DI KALIMANTAN TENGAH

Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen mempercepat akses listrik bagi desa-desa yang belum dilistriki PT PLN (Persero) di Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan peta jalan kelistrikan hingga 2024 di Kalimantan Tengah yang telah disusun oleh PLN.



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan hal tersebut saat mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Kelistrikan Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/4/2022). Acara ini dihadiri oleh Wakil Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman, anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph dan Mukhtarudin, serta Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo.

Rapat ini dihadiri pula oleh perwakilan Kementerian BUMN, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se-Kalimantan Tengah, serta Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN Adi Lumakso. "Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan berkomitmen memberikan akses kelistrikan di seluruh Indonesia. Kalimantan saat ini menjadi prioritas dalam pengembangan kelistrikan, mengingat dua indikator: rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi masih perlu ditingkatkan, khususnya Saudara-saudara kita yang bermukim di 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)," ujar Rida.

Rida menyampaikan berdasarkan data hingga akhir tahun 2021, dari 1.571 desa/kelurahan di Kalimantan Tengah, sebanyak 467 desa masih belum memperoleh akses listrik dari PLN. Dari 467 desa tersebut, 424 desa mendapatkan akses listrik dari pembangkit listrik bantuan pemerintah daerah/swadaya masyarakat, sedangkan 43 desa mendapatkan listrik dari Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dari bantuan Kementerian ESDM.

Ia mengatakan secara total masih ada 1.308 desa di Pulau Kalimantan termasuk 467 desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang masih belum memperoleh akses listrik dari PLN. Hal ini menjadi perhatian khusus dari Anggota Komisi VII DPR RI, terutama yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan.

"Diperlukan upaya-upaya serius untuk dapat mengembangkan akses listrik ke desa-desa tersebut termasuk pengalihan dari LTSHE menjadi pelanggan PLN. Tidak hanya melistriki desa-desa yang belum dilistriki oleh PT PLN (Persero), tetapi juga perluasan jaringan listrik ke dusun-dusun yang belum berlistrik," ia menjelaskan.

Rida menuturkan sebagai perwujudan energi berkeadilan, pemerataan akses listrik merupakan keharusan sehingga akses listrik dapat menjangkau dan dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di seluruh Indonesia, termasuk masyarakat di daerah 3T. Ia lantas menyebut Rasio Elektrifikasi (RE) Nasional mencapai 99,45% dan Rasio Desa Berlistrik (RD) Nasional telah mencapai 99,65% hingga akhir 2021.

"Sepuluh tahun terakhir kita bisa mengejar ketertinggalan RD dan RE, namun beberapa tahun terakhir melandai karena yang belum dilistriki adalah di 3T yang aksesnya sangat sulit," Rida menyampaikan.

Dalam kesempatan yang sama, Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasinya kepada Ditjen Ketenagalistrikan yang memfasilitasi pembahasan kelistrikan di Kalimantan Tengah melalui Rapat Koordinasi.

"DPR RI menangkap aspirasi dari masyarakat yang ada di kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Berdasarkan data, terdapat 467 desa di Kalimantan Tengah yang belum merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal Kalimantan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian bangsa Indonesia," ujar Maman.

Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Kelistrikan Kalimantan Tengah ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang menjadi acuan untuk mendorong pengembangan kelistrikan Kalimantan Tengah khususnya listrik perdesaan. Pada akhir acara dilakukan penandatanganan berita acara yang ditandatangani seluruh peserta rapat.

"Mudah-mudahan rapat koordinasi teknis ini betul-betul memberikan manfaat bagi kemajuan masyarakat Kalimantan Tengah yang membutuhkan realisasi dari sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mohon Pemerintah dan PLN menjadikan 467 desa di Kalimantan ini sebagai prioritas perhatian," pungkaskan Maman. (AMH)

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Kelistrikan Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (14/04/2022).



RIDA MULYANA

“ Kalimantan saat ini menjadi prioritas dalam pengembangan kelistrikan, mengingat dua indikator: rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi masih perlu ditingkatkan, khususnya Saudara-saudara kita yang bermukim di 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)





DISKUSI KATADATA, KESDM KOMITMEN KURANGI PEMANFAATAN FOSIL

Sejalan dengan arah Kebijakan Energi Nasional, Indonesia berkomitmen melaksanakan transisi energi dari fosil menuju energi yang lebih bersih dan minim emisi. Sektor energi Indonesia sendiri ditargetkan dapat menurunkan emisi sebesar 314-446 juta ton CO₂e pada tahun 2030. Transisi energi tersebut dilakukan melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara masif dan pengurangan pemanfaatan energi fosil secara bertahap.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mewakili Menteri ESDM dalam acara Forum *Indonesia Data and Economic (IDE) "Together for The New Future"* dengan tema "Pajak Karbon di G20: Momentum untuk Mengakselerasi Pemulihan Hijau" yang diselenggarakan oleh Katadata di Jakarta, Jumat, (08/04).

"Transisi Energi dapat dicapai dengan (pengembangan) EBT masif yang tersebar, pengurangan pemanfaatan fosil bertahap, kemudian mendorong penggunaan elektrifikasi baik untuk kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga, serta penerapan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan," ungkap Dadan.

Dadan menyebutkan, pada COP 26 tahun 2021 Indonesia telah berkomitmen untuk menuju *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional. Dalam *roadmap NZE*, pemerintah telah mencanangkan pengurangan PLTU yang ditandai dengan tidak ada lagi penambahan PLTU baru sebagaimana tertuang dalam RUPTL PLN.

Dalam rangka upaya mengurangi emisi GRK, pemerintah telah menerbitkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan menerapkan carbon tax pada PLTU batubara mulai 1 Juli 2022. Antara lain melalui penerapan cap atau batas atas emisi, penetapan peraturan Menteri Keuangan tentang tata laksana pajak karbon atau *cap and tax*, dan juga pelaksanaan pajak karbon secara terbatas.

Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Bayu Nugroho sebagai narasumber acara tersebut mengatakan, pemerintah bahu membahu bersinergi dalam mempersiapkan penerapan carbon tax kepada pelaku usaha pembangkitan.

"Butuh kesiapan-kesiapan untuk lebih bisa menerapkan ini, pemerintah bahu membahu mencoba mensinergikan peraturannya sehingga nanti kedepan bisa lebih diterima oleh pelaku usaha," ungkap Bayu yang hadir mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wahyu Marjaka menyampaikan bahwa Indonesia memiliki *roadmap*/peta jalan *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang sudah disiapkan untuk menjadi pedoman seluruh sektor dalam mencapai target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

"Setiap tahun kita melakukan pengukuran dari target-target yang harus diverifikasi, dari pengukuran tersebut setiap tahun KLHK menyampaikan laporan inventarisasi GRK nasional dan juga laporan penurunan emisi GRK yang merujuk pada target 2 tahunan. Untuk mencapai target itu tentu kita mengembangkan strategi dan disepakati di berbagai sektor," ungkap Wahyu.

Pada tahun 2025 perdagangan karbon secara penuh akan diimplementasikan. Dalam rangka persiapan pelaksanaan tersebut, di tahun 2021 lalu kementerian ESDM telah melaksanakan uji coba perdagangan karbon untuk PLTU batubara secara *volunteer*.

Dari simulasi yang diikuti oleh 35 pembangkit tersebut, terdapat 28 transaksi perdagangan karbon senilai 1.54 M. Penerimaan dari pajak karbon kedepan diharapkan dapat bermanfaat

untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberi dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial.

"Kebijakan pajak karbon ini merupakan paket kebijakan komprehensif untuk penurunan emisi, dan juga untuk stimulus untuk perkembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan," tutup Dadan.

Forum IDE ini merupakan kegiatan tahunan Katadata yang diselenggarakan sejak tahun 2019. Setiap tahunnya, IDE Katadata selalu menghadirkan pejabat tinggi pemerintahan, top CEO dan pembicara internasional yang membahas tema-tema penting. (U)



Forum Indonesia Data and Economic (IDE) "Together for The New Future" dengan tema "Pajak Karbon di G20: Momentum untuk Meningkatkan Pemulihan Hijau" yang diselenggarakan oleh Katadata di Jakarta, Jumat, (08/04/2022)

PENGADUAN PUBLIK DI DITJEN GATRIK DISELESAIKAN DENGAN

CECEP

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki prinsip Cepat, Cermat, dan Produktif (CECEP) dalam mengelola pengaduan pelayanan publik. Pengaduan-pengaduan yang masuk juga dikelola sebagai masukan perbaikan kebijakan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pada Evaluasi Lanjutan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Ke-4 yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Jumat, 27 Mei 2022.

Pengelolaan pengaduan secara Cepat, Cermat dan Produktif disebut Rida telah dibuktikan dengan berbagai capaian pelaksanaan pengaduan. Cepat dapat dilihat dari penanganan pengaduan yang cepat sesuai dengan *Service Level Guarantee* (SLG). Rata-rata pengaduan masyarakat Ditjen Ketenagalistrikan di SP4N Lapor ditanggapi dalam waktu 2,1 hari untuk periode tahun 2021. Jauh lebih cepat dari SLG yang ditetapkan di SP4N Lapor yaitu 5 hari.



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan prinsip Cepat, Cermat, dan Produktif (CECEP) pada Evaluasi Lanjutan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Ke-4 yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Jumat (27/05/2022).



Cermat dapat dilihat dengan selesai dan tidak ada satu pun yang terlewat dari semua pengaduan masyarakat yang masuk. Sedangkan Produktif dilihat dari banyaknya pengaduan yang masuk karena sosialisasi yang masif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, namun semua selesai.

"Kami juga produktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui website, media sosial, dan berbagai webinar untuk memastikan masyarakat bisa melakukan pengaduan pelayanan ketenagalistrikan kepada kami," ujar Rida.

Salah satu contoh pelaksanaan pengaduan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang dilaksanakan secara CECEP yaitu pengaduan kepesertaan subsidi listrik. Dalam pelayanan pengaduan tersebut, Tim Posko Ditjen Ketenagalistrikan memverifikasi data yang masuk melalui website maupun aplikasi. Jika data pelanggan valid, maka pengaduan akan diteruskan kepada Kementerian Sosial/Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diverifikasi. Apabila pemohon ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh PLN dengan melakukan pemadanan data atau mengubah tarif pelanggan ke tarif bersubsidi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dari 363.908 pengaduan yang masuk hingga Februari 2022 semuanya telah diverifikasi. Sebanyak 193.838 pengaduan telah selesai, sedangkan 170.070 sedang diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Tidak ada pengaduan yang tertahan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Pengaduan Sebagai Masukan Perubahan Kebijakan

Dalam paparannya, Rida menyampaikan bahwa Ditjen Ketenagalistrikan berkomitmen untuk menyelesaikan semua pengaduan yang masuk dan menjadikan pengaduan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan. Salah satu kebijakan yang diperbaiki berdasarkan pengaduan yang masuk adalah revisi regulasi tentang mekanisme pemberian subsidi listrik.

"Salah satu perbaikan layanan hasil dari evaluasi pengaduan masyarakat adalah inovasi pengaduan kepesertaan subsidi listrik," ujar Rida.

Lebih lanjut Rida menjelaskan bahwa perubahan kebijakan atau revisi yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut diterapkan pada Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga. Sebelum dilakukan perubahan, awalnya masyarakat yang ingin melakukan pengaduan harus mendatangi kantor kelurahan untuk diteruskan ke kecamatan dan kemudian diinput dalam aplikasi yang dimonitor oleh Posko Nasional yang berkedudukan di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan.

"Karena banyaknya pengaduan terkait susah akses ke kantor kepala desa atau kelurahan, mendorong kami berinovasi mengembangkan aplikasi PEDULI atau Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui ponsel berbasis android," ungkap Rida.

Seperti diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik, dimana Ditjen Ketenagalistrikan masuk dalam kategori Unit Pelayanan Publik. Dewan Juri pada tahap Evaluasi adalah Gita Irawan Wirjawan (Tokoh Masyarakat); Taufiq Rahman (Media); Meuthia Ghani Rochman (Pakar/Akademisi); Eva Kusuma Sundari (Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional); dan Sad Dian Utomo (Lembaga Swadaya Masyarakat).

"Kami berkomitmen terus berinovasi dan melakukan upaya berkelanjutan sesuai dengan rencana aksi yang telah kami susun sehingga kami dapat lebih meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan menjadi bahan perbaikan pelayanan kami di masa yang akan datang," tutup Rida. (U)



TARIF LISTRIK BERKEADILAN DAN SUBSIDI TEPAT SASARAN MELALUI PENERAPAN *TARIFF ADJUSTMENT*

oleh:
David Firnando Silalahi, Eri Nurcahyanto, Syarifuddin Achmad

I. Pendahuluan

Tarif tenaga listrik merupakan biaya atau harga energi listrik yang dibayarkan oleh konsumen (pelanggan) kepada penyedia listrik. Melalui bayaran tarif listrik dari konsumen, penyedia listrik dapat membayar biaya produksi energi listrik di pembangkit listrik, biaya investasi dalam transmisi dan distribusi energi listrik, biaya operasi dan pemeliharaan sistem kelistrikan, dan mendapat sejumlah margin keuntungan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa tarif listrik di Indonesia ditetapkan dengan mengacu biaya keekonomian berkeadilan. Penetapan tarif tenaga listrik dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

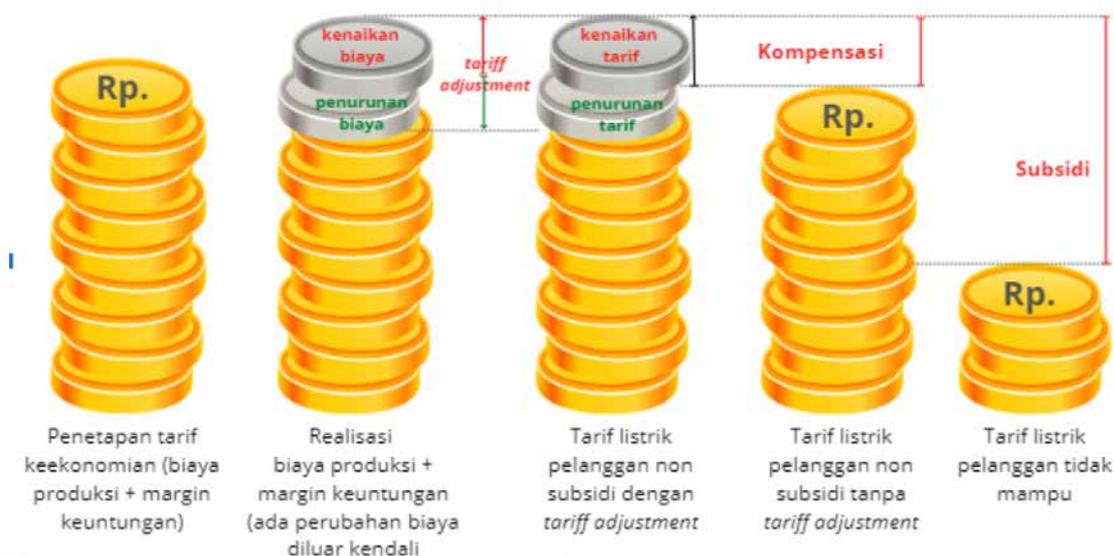
Pemerintah menerapkan tarif tenaga listrik dengan memperhatikan antara lain kemampuan daya beli masyarakat. Pelanggan yang memiliki daya beli tinggi (pelanggan mampu/kaya) diarahkan membayar tarif keekonomian (tidak bersubsidi), sedangkan

pelanggan yang tidak mampu diberikan tarif bersubsidi. Di samping itu, Pemerintah juga memberikan subsidi listrik untuk golongan bisnis dan industri kecil dan menengah (UMKM).

II. Perkembangan kebijakan tarif listrik dan subsidi

Secara sederhana subsidi listrik dapat dipahami sebagai selisih antara tarif listrik (harga jual) pelanggan tidak mampu dengan biaya penyediaan tenaga listrik (biaya produksi termasuk margin keuntungan). Dengan adanya kebijakan subsidi listrik, maka Pemerintah wajib mengganti selisih antara biaya produksi dengan tarif yang dibayarkan oleh pelanggan tidak mampu.

Kebijakan subsidi listrik diawali pada tahun 2000 dengan bentuk "*corporate cash flow subsidy*". Subsidi diberikan apabila total biaya operasional PT PLN (Persero) (selanjutnya disingkat PLN) lebih tinggi daripada pendapatan penjualan listrik yang diperoleh dari pelanggan. Hal ini dilakukan agar PLN tidak merugi. Kemudian pada tahun 2001 hingga tahun 2004 kebijakan subsidi listrik berubah menjadi subsidi konsumen terarah, yaitu diberikan untuk pemakaian 60 kWh pertama dan hanya untuk pelanggan pada daya maksimal 450 VA.



Gambar 1. Ilustrasi biaya produksi, subsidi, dan kompensasi dalam tarif listrik

Namun ada krisis ekonomi pada tahun 2005, dimana terjadi terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah yang diperburuk dengan naiknya biaya energi primer yang membuat biaya produksi PLN membengkak. Pada saat itu, demi meredam guncangan ekonomi, Pemerintah memutuskan subsidi listrik diperluas untuk seluruh pelanggan. Ketika ekonomi mulai membaik, pada tahun 2010, Pemerintah sempat melakukan peninjauan tarif tenaga listrik, dan telah dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik. Namun demikian upaya ini tidak terlalu signifikan menekan laju subsidi listrik.

Subsidi listrik yang pada kurun waktu tahun 2000-2004, hanya berkisar Rp 3 - 4 triliun. Pada tahun 2010 subsidi melonjak hingga Rp. 58,1 triliun, meski waktu itu ada penyesuaian tarif listrik. Berikutnya pada tahun 2011 naik hampir dua kali lipat menjadi Rp. 93 triliun. Kemudian pada tahun 2012, mencapai puncaknya sebesar Rp 103 triliun. Realisasi subsidi listrik sudah naik lebih dari tiga puluh kali lipat dibanding subsidi pada awal tahun 2000-an. Konsumsi listrik yang terus tumbuh, kenaikan biaya produksi listrik, menjadi penyebab utama lonjakan besaran subsidi listrik.



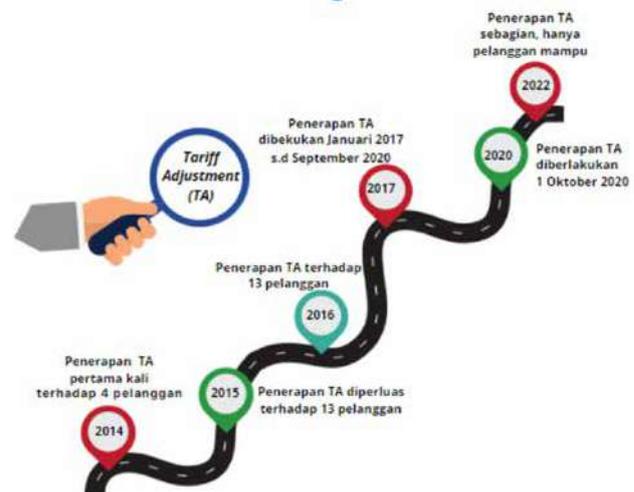
Gambar 2. Perkembangan subsidi listrik sejak tahun 2000

Untuk mengendalikan subsidi listrik, pada tahun 2014, kembali dilakukan penataan pemberian subsidi listrik dengan pertimbangan keterbatasan keuangan negara. Pada semester 1 2014, empat golongan pelanggan dicabut subsidiya. Pelanggan rumah tangga mewah (R-3) daya 6.600 VA ke atas, bisnis menengah (B-2) daya 6.600 VA s.d 200 kVA (hotel bintang 3, kantor perbankan, restoran besar), bisnis besar (B-3) daya di atas 200 kVA (Shopping Center/ Mall, Hotel bintang 4, hotel bintang 5, taman hiburan dan rekreasi komersil, stasiun TV swasta), dan kantor pemerintah sedang (P-1) daya 6.600 VA s.d 200 kVA (Kantor Pemerintah dan Pemerintah Daerah). Kemudian pada semester 2 pada tahun yang sama, dilanjutkan pencabutan subsidi terhadap 6 golongan pelanggan lainnya. Termasuk diantaranya rumah tangga R-1 (daya 1.300 VA), rumah tangga R-1 (daya 2.200 VA), rumah tangga R-2 (daya 3.500 VA s.d 5.500 VA), Pemerintah P-2 (daya diatas 200 kVA), Penerangan Jalan Umum P-3, Industri I-3. Kebijakan tersebut mampu menurunkan subsidi hingga Rp. 55 triliun pada akhir tahun 2015.

III. Penerapan *Tariff Adjustment* terhadap pelanggan non subsidi

Penerapan penyesuaian tarif berkala (*tariff adjustment*) mulai diberlakukan oleh PLN pada Juli 2014 untuk pertama kali. Penyesuaian tarif berkala ini tidak bisa lepas dari kebijakan subsidi listrik agar semakin tepat sasaran. Agar masyarakat mampu tidak menerima subsidi listrik, maka perlu ada mekanisme agar pelanggan tetap membayar sesuai biaya keekonomian. Jika ada perubahan biaya produksi listrik, maka tarif yang dibayar pelanggan ini berubah mengikuti perubahan biaya tersebut. Untuk itu perlu penyesuaian tarif secara berkala. Prinsipnya mirip dengan harga bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar minyak, yang bisa setiap hari berubah, fleksibel naik turun mengikuti biaya produksinya.

Dengan membayar sesuai dengan biaya produksinya, maka pelanggan mampu tidak lagi disubsidi. Dari total 37 golongan pelanggan PLN, penyesuaian tarif berkala pertama kali diterapkan pada empat golongan pelanggan. Pelanggan rumah tangga besar (R-3) daya 6.600 VA ke atas, bisnis menengah (B-2) daya 6.600 VA s.d 200 kVA, bisnis besar (B-3) daya di atas 200 kVA, dan kantor pemerintah sedang (P-1) daya 6.600 VA s.d 200 kVA. Kemudian pada tahun 2015 Pemerintah menambahkan 9 golongan pelanggan diterapkan penyesuaian tarif berkala ini dilakukan setiap bulan, dan berlangsung hingga akhir tahun 2016. PLN diberi keleluasaan untuk langsung menerapkan *tariff adjustment*.



Gambar 3. Penerapan penyesuaian tarif berkala (*tariff adjustment*) 2014 - 2022

Namun sejak tahun 2017, PT PLN (Persero) wajib mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendapatkan persetujuan. Meskipun ada kenaikan biaya produksi listrik, penerapan *tariff adjustment* tidak serta merta diterapkan. Atas pertimbangan tertentu, Menteri dapat menunda atau menetapkan berbeda dari usulan PLN.

Sebagai contoh, demi mempertahankan tingkat inflasi di level yang rendah, dan menjaga daya saing sektor bisnis dan industri dalam negeri, maka Pemerintah sempat menunda penerapan *tariff adjustment* meskipun ada usulan penyesuaian tarif dari PLN.

Tarif yang dibayarkan pelanggan non subsidi besarnya tetap sejak Januari 2017 hingga September 2020. Namun pada periode Oktober-Desember 2020 diterapkan *tariff adjustment*. Khusus tarif tegangan rendah tarif mengalami penurunan dari semula Rp. 1467 per kWh menjadi Rp. 1445 per kWh. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat yang baru mulai pulih pasca pandemi Covid-19.

Dengan kebijakan tersebut, secara prinsip Pemerintah memberikan bantuan untuk semua golongan tarif pelanggan. Subsidi bagi pelanggan dengan tarif bersubsidi, dan dalam bentuk kompensasi kepada PLN karena pelanggan non subsidi tidak membayar sesuai keekonomian.

Sejak 2017, Pemerintah telah mengucurkan total Rp. 94,7 triliun dalam bentuk kompensasi tersebut. Kompensasi ini sebagian besar dinikmati oleh pelanggan golongan industri dan bisnis.

Tariff adjustment ini semula hanya mempertimbangkan 3 faktor utama diluar kendali PLN yang berdampak pada biaya penyediaan tenaga listrik. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS (Kurs), harga minyak mentah Indonesia, dan tingkat inflasi. Kurs ini terkait dengan biaya pembayaran pinjaman luar negeri, pembayaran transaksi pembelian listrik dari pembangkit swasta yang dihitung dalam Dollar AS per. Harga minyak mentah (ICP) berpengaruh pada harga gas untuk pembangkit. Tingkat inflasi mempengaruhi biaya-biaya operasional lainnya. Namun demikian, sejak tahun 2020 pada perhitungan tariff adjustment ditambahkan faktor harga batubara yang relatif fluktuatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

IV. Sasaran dan Dampak Penerapan Tariff Adjustment 2022

Pandemi global Covid-19 yang belum usai diperparah dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, telah

mengerek harga energi pasar global. Dengan fluktuasi kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika yang cenderung naik, kenaikan harga gas alam, kenaikan harga batubara, kenaikan harga minyak dunia, maka biaya bahan baku yang digunakan PLN untuk pembangkit listriknya juga naik. Biaya produksi PLN membengkak. APBN tidak lagi mampu menanggung subsidi listrik yang diperkirakan membengkak menjadi Rp 65,07 triliun. Demi menjaga bantuan Pemerintah lebih tepat sasaran, maka perlu diberlakukan kembali *tariff adjustment* terhadap pelanggan mampu, yaitu golongan rumah tangga berdaya mulai 3.500 VA ke atas (R.2 dan R.3) dan golongan Pemerintah (P.1, P.2, dan P.3).

Besaran *tariff adjustment* periode Juli - September 2022 mempertimbangkan tingginya perubahan realisasi indikator ekonomi makro selama rata-rata tiga bulan yaitu Februari-April 2022.

Terutama harga *Indonesian Crude Oil Price* (ICP) dan Batubara. Kurs Rp 14.356 per dolar AS (asumsi semula Rp 14.350/USD), ICP USD 103.91 per barel (asumsi semula USD 65 per barel), inflasi 0,53 persen (asumsi semula 0,25 persen), harga patokan batu bara Rp 837 per kg sama (realisasi rata-rata di atas USD 70 per ton).

Besaran penyesuaian tarif kali ini terkesan tinggi, naik sebesar 17,6% untuk tarif tegangan rendah yang dibayarkan pelanggan rumah tangga daya 3500VA ke atas, pelanggan P1 6600VA dan pelanggan P3. Tarifnya disesuaikan dari sebelumnya Rp1.444,7 per kWh menjadi Rp1.699,5 per kWh. Sedangkan pelanggan P2 200 kVA, membayar 36,6% lebih tinggi dari tarif sebelumnya. Tarifnya disesuaikan dari semula Rp1.114,7 per kWh menjadi Rp1.522,9 per kWh. Namun perlu dicatat bahwa dengan mekanisme *tariff adjustment*, tarif juga dapat turun jika realisasi indikator ekonomi makro selama rata-rata tiga bulan kedepan menunjukkan kecenderungan penurunan.

Golongan Pelanggan Non Subsidi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
R.1 / 900 VA-RTM									
R.1 / 1.300 VA		✓	✓				✓		
R.1 / 2.200 VA		✓	✓				✓		
R.2 / 3.500 VA s/d 5.500 VA		✓	✓				✓		✓
R.3 / 6.600 VA ke atas	✓	✓	✓				✓		✓
B.2 / 6.600 VA s/d 200 kVA	✓	✓	✓				✓		
B.3 / > 200 kVA	✓	✓	✓						
I.3 / > 200 kVA		✓	✓						
I.4 / 30.000 kVA ke atas		✓	✓						
P.1 / 6.600 VA s/d 200 kVA	✓	✓	✓				✓		✓
P.2 / > 200 kVA		✓	✓						✓
P.3		✓	✓				✓		✓
L / Layanan khusus		✓	✓				✓		✓

✓ diterapkan *tariff adjustment*

Gambar 4. Penerapan Penyesuaian Tarif Berkala (Tariff Adjustment)

Meskipun demikian, dampak terhadap inflasi nasional tetap terukur dan tidak terlalu berdampak. Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal memperkirakan dampak inflasi hanya sekitar 0,02% pada triwulan III tahun 2022. Sebelum menerapkan kebijakan tarif ini, Pemerintah telah berhitung cermat. Jika mengikuti kebijakan yang telah berlaku pada tahun 2015, seharusnya ada pelanggan rumah tangga non subsidi sebanyak 44 juta (daya 900VA RTM, 1300VA, 2200VA, 3500VA, 6600VA). Namun demikian, Pemerintah baru menasar kelompok rumah tangga berkemampuan ekonomi atas. Hanya kepada sekitar 2 juta pelanggan rumah tangga daya 3500VA ke atas yang terdampak kebijakan ini. Ditambah dengan sekitar 98 ribu pelanggan berupa kantor-kantor Pemerintah.

Jadi tidak ada pelanggan kecil yang mengalami penyesuaian tarif. Dengan asumsi tiap rumah tangga mampu daya 3500VA ke atas dihuni oleh empat orang, maka hanya 8 juta masyarakat yang merasakan kenaikan rekening listrik. Itupun termasuk pada kelompok ekonomi mampu. Jumlah ini setara dengan 3% dari total 270 juta jiwa penduduk Indonesia.

Apabila ada usaha kecil (UMKM) yang terdampak dari kebijakan ini, misalnya usaha 'home industry', warung kecil, warung makan, atau usaha laundry, maka pelanggan UMKM dihimbau untuk pindah

V. Dampak positif penyesuaian tarif listrik

Meskipun biaya penghematan subsidi listrik tidak serta merta dialihkan kepada pos belanja tertentu, namun secara kasat mata dapat terlihat bahwa banyak percepatan pembangunan kelistrikan yang terjadi bersamaan dengan proses reformasi subsidi listrik tepat sasaran. Sejak pertama kali dilakukan reformasi subsidi listrik pada tahun 2010 telah banyak pencapaian pembangunan di sektor ketenagalistrikan. Bahkan penyediaan tenaga listrik telah surplus di beberapa sistem. Meski belum sempurna realisasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sudah semakin merata.

Sebagai gambaran, rasio elektrifikasi pada tahun 2021 telah mencapai 99,45%, jauh lebih tinggi daripada tahun 2010 yang hanya 67,2%. Rasio desa berlistrik pada tahun 2021 telah mencapai 99,7%, jauh lebih tinggi daripada tahun 2010 yang baru sekitar 92,5%. Bantuan sambungan gratis pelanggan tidak mampu juga terus diupayakan oleh Pemerintah. Misalnya pada tahun 2020 terealisasi 57.573 sambungan. Melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), tahun 2022 ditargetkan pemasangan 80 ribu sambungan listrik gratis untuk masyarakat miskin.

Dengan upaya tersebut, Pemerintah berhasil menaikkan konsumsi per kapita hampir dua kali lipat. Semula hanya 620 kWh per kapita di tahun 2010 naik menjadi 1123 kWh per kapita di tahun 2021.

VI. Ketepatan subsidi listrik terus diupayakan

Meskipun secara amanat konstitusi hanya masyarakat tidak mampu yang berhak atas subsidi, namun Pemerintah tidak bisa serta merta mencabut subsidi listrik secara drastis. Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, maka upaya bertahap terus dilakukan. Perbaikan sasaran penerima subsidi listrik terus dilakukan.

Pada tahun 2017, Pemerintah menugaskan PLN untuk hanya memberikan tarif bersubsidi pada pelanggan daya 900 VA yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Basis Data Terpadu). Data Kementerian Sosial yang memuat 40% masyarakat dengan ekonomi terbawah. Pelanggan 900 VA yang tidak termasuk dalam Data Terpadu tersebut tidak lagi diberikan subsidi. Calon pelanggan baru daya 900 VA dan 450 VA hanya dilayani dengan tarif bersubsidi bila datanya ada pada Data Terpadu tersebut. Dengan kata lain, masyarakat tidak mampu tetap dijamin mendapatkan bantuan subsidi dari Pemerintah.

Kedepannya subsidi listrik telah direncanakan diberikan melalui bantuan langsung. Semua pelanggan akan membayar tarif keekonomian. Namun sasaran penerima subsidi diberikan sejumlah uang sebagai subsidi listrik. Dengan demikian tarif listrik berkeadilan dan subsidi listrik tepat sasaran akan dapat terwujud.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
4. Surat Menteri ESDM No. T-162/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Periode Juli – September 2022)
5. Konferensi Pers terkait Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik di Sekretariat Jenderal KESDM, 13 Juni 2022
6. Data internal Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PERESMIAN

PLTGU Riau





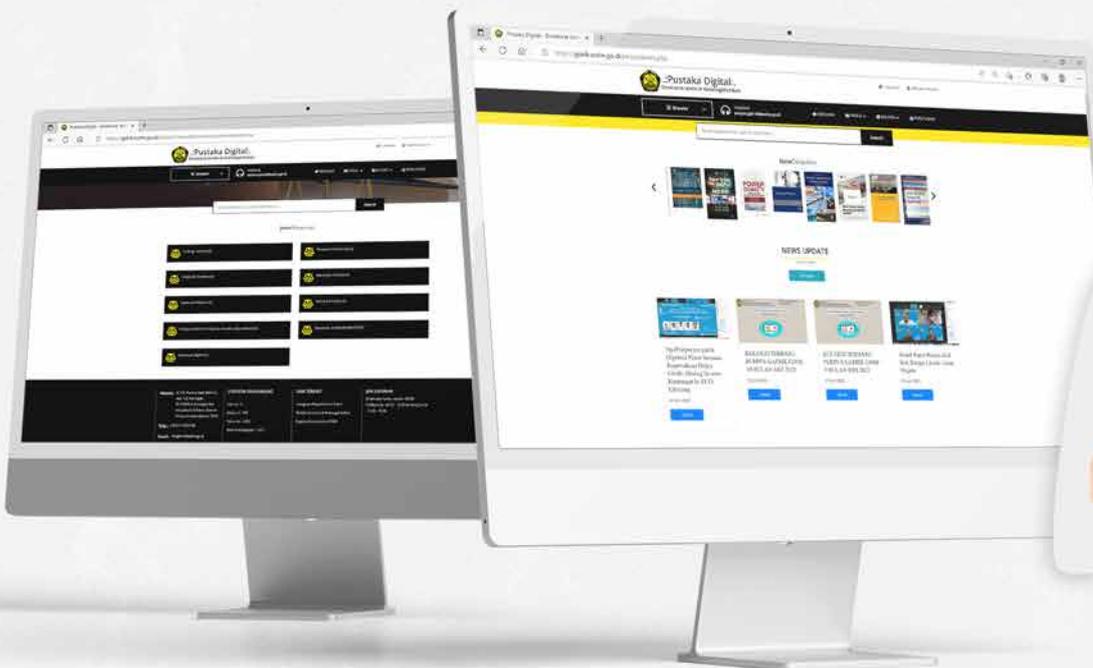
DAFTAR REGULASI KOLEKSI PERPUSTAKAAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN SEMESTER I TAHUN 2022

No.	Daftar Legislasi dan Regulasi Terbaru Koleksi Perpustakaan DJK	Status
1	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu	
2	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik	<p>Mencabut Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2006 Tentang Pembelian Tenaga Listrik dan / atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum</p> <p>Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik</p>
3	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum	
4	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2.K/TL.01/MEM.L/2022 Tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur Liquefied Natural Gas Serta Konversi dari Penggunaan Bahan Bakar Minyak Menjadi Liquefied Natural gas dalam Penyediaan Tenaga Listrik	Mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur Liquefied Natural Gas (LNG), Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan Liquefied Natural Gas (LNG) Dalam Penyediaan Tenaga Listrik

WEBSITE BARU PERPUS GATRIK

<https://gatrik.esdm.go.id/perpus/>

Tampilan Baru Lebih Fresh!





 gatrik.esdm.go.id /  Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan /   @infogatrik /  Info Gatrik



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.gatrik.esdm.go.id